Vol. V Desember 2012 - Januari 2013 Edisi 84

Ball Items

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



TED^X Makassar

x = independently organized TED event

- DI BALIK KAMPANYE MENGEMBALIKAN ANAK KE SEKOLAH
 - MAMPUKAN NTB MENJADI BUMI SEJUTA SAPI
 - **JALAN KE DEPAN BAGI INDONESIA**





BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.Tujuan BaKTINew adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer developmen challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern

BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.



MILA SHWAIKO VICTORIA NGANTUNG

ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI
SHERLY HEUMASSE

STEVENT FEBRIANDY

AFDHALIYANNA MA'RIFAH

AKRAM ZAKARIA

SUMARNI ARIANTO

ICHSAN DJUNAID

Pertanyaan dan Tanggapan

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125 Sulawesi Selatan - Indonesia T. +62 411 832228, 833383 F. +62 411 852146 E. info@bakti.org

www.bakti.org www.batukar.info

SMS BaKTINews 085255776165 E-mail: baktinews@bakti.org Anda juga bisa menjadi penggemar BaKTINews di Facebook : www.facebook.com/yayasanbakti

DAFTAR ISI CONTENTS

- Komunitas Seru, Menghadirkan Perubahan bagi Makassar
- Hidup Tanpa Negara Living Without A State

Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi

- Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, And Students
- Di Balik Kampanye Menyajikan ide dengan cara menyenangkan!
- 15 Nge-bloglah maka Kau Ada
- **MOVIEMENTO** Training Video untuk Anak Muda dengan Perspektif Anti-korupsi Video Training for Youth with an Anti-corruption Perspective
- Mengembalikan Anak ke Sekolah
- **TRANSPARANSI** Terungkap atau dipahami?
- Mampukan NTB Menjadi Bumi Sejuta Sapi
- Program Lamun Wakatobi
- Gerakan Seribu Rupiah Untuk Menggeser Kegalauan Ibu Melahirkan
- Jalan Ke Depan Bagi Indonesia
- **Profil LSM**
- Kegiatan di BaKTI
- Info Books

Berkontribusi untuk BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris,ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles

Menjadi Pelanggan BaKTINews

Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.org atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.org or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your

copy from the display corner from Monday to Friday

BaKTINews diterbitkan oleh Yavasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia. BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the

Government of Australia

Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia

The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR DECENTRALISATION (AIPD)





Ingin mengadakan kegiatan workshop, pelatihan, diskusi pembangunan, pemutaran film, peluncuran buku dan sebagainya tapi tidak punya tempat?

Ayo ke BaKTI saja!

Untuk reservasi tempat dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: Kantor Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)



Menyediakan ruang pertemuan bagi para pelaku pembangunan yang dapat menampung sampai 80 orang. Ruang Pertemuan BaKTI dilengkapi dengan fasilitas Air-conditioning, Sound system dan Mic, LCD projector, Screen, White board, Flip Chart serta free akses internet dan WiFi.

Att: **Sherly Heumasse** (Client Relation Officer)
Jl. H. A. Mappanyuki No.32
Makassar 90125 - Sulawesi Selatan.
T. +62 411 832228 F. +62 411 852146;
Email: info@bakti.org



Makassar Makassar

x = independently organized TED event

KOMUNITAS

Menghadirkan Perubahan bagi Makassar

OLEH VICTORIA NGANTUNG

TEDxMakassar kembali hadir untuk ketiga kalinya, mengulang sukses TEDxMakassar 2010 dan 2011. Para visioner Makassar berbagi ide-ide mereka dan menginspirasi para peserta untuk bersama melakukan perubahan menuju ke Makassar bahkan dunia yang lebih baik.

TEDX hadir di tingkat lokal dan bertujuan membagi ide-ide luar biasa untuk masa depan komunitas bumi yang lebih baik. Tahun ini TEDxMakassar mengangkat tema Communities for Change atau Komunitas untuk Perubahan.

THE VENUE Aula Museum Kota Makassar menjadi tempat pelaksanaan TEDxMakassar kali ini. Ruang dengan interior antik peninggalan masa Belanda ini

memberi kesan tersendiri bagi tak kurang dari seratus peserta yang dengan antusias mengikuti presentasi demi presentasi.

Museum Kota Makassar terletak di tengah kota tua Makassar. Gedung yang dibangun pada tahun 1916 ini berlantai dua dan bergaya eropa abad ke-17. Dinding-dindingnya tebal memiliki jendela-jéndela kayu yang lebar. Gedung ini menyimpan setidaknya 560 koleksi benda bersejarah yang merekam perjalanan Kota Makassar dari zaman ke zaman.



MUNGKIN ANDA BELUM TAU, ADA BANYAK SEKALI KOMUNITAS DI MAKASSAR YANG TELAH MENGUBAH WAJAH SANGAR MAKASSAR MENJADI ENERJIK **DAN CERDAS!**

THE BEGINING Tarian Barongsai menyambut peserta di pekarangan Museum Kota sekaligus menjadi tanda dimulainya TEDxMakassar 2012. Tabuhan genderang dan ceng meriah mengiringi Barongsai yang meliuk-liuk di pagi yang cerah hari itu, menghantarkan peserta TEDx Makassar untuk memasuki Aula Museum Kota.



THE VIDEOS Sebagai bagian dari acara global,

mengawali TEDxMakassar 2012, ditampilkan video presentasi Candy Chang tentang idenya 'Sebelum Meninggal Saya Ingin...' Candy Chang, sorang seniman dan TED Fellow, dalam presentasinya menceritakan bagaimana kontemplasinya setelah ditinggal wafat ibu angkatnya dan keadaan lingkungannya di New Orleans. la lalu mengubah rumah terbengkalai menjadi papan tulis raksasa dan menulis sebuah kalimat tak selesai,"Sebelum meninggal saya ingin" Jawaban dari para tetangganya mengejutkan, memilukan, lucu, namun juga menjadi cermin bagi masyarakat yang tidak terduga sebelumnya.

Menyusul video presentasi dari Candy Chang, peserta TEDxMakassar juga terpukau oleh video presentasi Charlie Todd tentang Pengalaman Kekonyolan Bersama-sama. Dalam video ini, Charlie Todd bercerita tentang bagaimana membuat kehebohan di tempat umum yang aneh, lucu, dan tidak terduga.

Sebanyak tujuhpuluh penari menari di depan etalase toko,

"pembasmi setan" berlari melintasi Perpustakaan Umum New York, dan acara tahunan "naik kereta tanpa celana." Di panggung TEDxBloomington Charlie Todd menunjukkan bagaimana kelompoknya, Improv Everywhere, menggunakan kehebohan ini untuk mengakrabkan orangorang.

Setelah menikmati makan siang, TEDxMakassar 2012 menampilkan video presentasi Derek Sivers berjudul Bagaimana Memulai Sebuah Gerakan. Dengan bantuan dari sebuah cuplikan dahsyat, Derek Sivers menjelaskan bagaimana sebuah gerakan terbentuk.

THE IDEAS



SARTIKA NASMAR MERAJUT UNTUK HAK-HAK PEREMPUAN

Presentasi live pertama hari itu dimulai dengan ide Sartika Nasmar yang berbagi pengetahuan dengan para perempuan di daerah termarjinalkan di Kota Makassar dan sekitarnya. Bersama komunitas perajut QuiQui, Sartika menyelenggarakan

berbagai kegiatan merajut bersama sekaligus berbagi ragam informasi mulai dari kesehatan reproduksi sampai peluang wirausaha. Merajut sambil berdiskusi menjadi cara untuk menyadarkan kaum perempuan akan hak-hak dasar mereka.

Anak muda Makassar punya energi berlebih yang karena tak tau mesti disalurkan ke mana, lantas menjadi sesuatu yang negatif: tawuran dan halhal anarkis lainnya. Wahyudin Mas'ud percaya, berkebun bisa menjadikan generasi muda Makassar menjadi lebih kreatif. Bersama Makassar Berkebun, Wahyudin mengampanyekan kebun kota sebagai penghilang stres.

WAHYUDIN MAS'UD BERKEBUN SEBAGAI PENYEMBUH STRESS





ERLINA A Y U MENULIS DENGAN NOL BAKAT

Erlina Ayu adalah seorang ibu yang empat tahun terakhir memutuskan untuk bekerja dr rumah sebagai penulis, blogger, dan pebisnis online. Erlina aktif meyakinkan siapa saja, terutama ibu-ibu, untuk mulai menulis dan menjadi penulis. Dalam TEDxMakassar 2012, ia berbagi inspirasinya menulis dengan NOL bakat. Erlina juga meminta beberapa peserta menuliskan satu kata yang

mewakili ide di kepala mereka, kemudian merangkainya menjadi sebuah kalimat pengantar cerita.

Bertahun-tahun Zainal Siko berjuang mengingatkan pentingnya Pasar Tradisional bagi masyarakat kota Makassar. Di panggung TEDxMakassar 2012, Zainal Siko menceritakan bagaimana rantai dagang yang menghubungkan petani di desa, dengan pasar tradisional dan setiap keluarga di kota Makassar. Zainal mengingatkan bahwa pasar tradisional adalah urat nadi perekonomian Makassar yang sesungguhnya.





photoː Doc. Yayasan BaKTI_CHN



SAMSUL SUNDUSENG LOKAL 'CIKA', BUT GLOBAL CES

Berkunjung ke daerah dan negara lain dilakukan Samsul Sanduseng untuk mengenal lebih dekat adat dan merasakan sendiri kebiasaan penduduk lokal. Tapi di balik itu, Samsul dan teman-temannya di komunitas Makassar Backpacker memiliki obsesi untuk memper-

kenalkan Sulawesi Selatan di mata dunia. Samsul juga membuka mata peserta yang hadir bahwa bepergian ke negara lain tidak harus dengan biaya yang mahal dan bahwa semua orang sekarang bisa melancong ke mana saja.



HENDRIK TEDJO PESAN KEMANUSIAAN DARI NAGA BARONGSAI

Barongsai tidak hanya sekedar naga yg meliuk-liuk. Menkadi pemain barongsai membutuhkan keahlian tersendiri dan kemampuan fisik yg luar biasa. Hendrik Tedjo, seorang suhu Kungfu dan Pemimpin Grup Barongsai Shaolin di Makassar berbagai teknik-teknik dalam Barongsai dan pesan kemanusiaan dari naga mistis ini.

HE PERFORMERS

Pemain gitar bass yang bersuara keren ini mendapatkan animo terbesar peserta TEDx Makassar 2012. Hadir di penghujung acara, Rizki de Keizer membuat semua yang hadir saat itu enggan beranjak walaupun acara telah berakhir.

RIZCKY DE KEIZER



Saat ketiga pemain biola ini berkolaborasi membawakan lagu Christina Perri 'A Thousand Years', sontak peserta bersenandung TEDxMakassar mengikuti lantunan lagu romantis ini.

CHAMBER MUSIC GROUP PERFORMANCE





MAWAR & FADHILA











Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan akhir di Antang tidak hanya terekspos berbagai penyakit, tapi juga bahaya dari limbah rumah tangga dan rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik. Risnawati berbagi kisah bagaimana anak-anak di sana belajar bermain dan ilmu-ilmu dasar lainnya. Rinawati mengingatkan bahwa anak-anak pemulung pun punya cita-cita dan bersemangat belajar, walaupun

sambil bekerja mengumpulkan sampah.



FARID SATRIA BAGAIMANA SEPAKBOLA MENGUBAH KEHIDUPAN

Sepakbola mengajarkan kami tidak hanya bekerjasama dalam tim, lebih dari itu, sepakbola mengubah kehidupan kami. Farid Satria bersama teman-temannya di Pagolo Football Club bangkit melawan stigma terhadap Orang yang Hidup dengan HIV AIDS (ODHA). Farid menceritakan pengalamannya saat bergabung dengan Timnas Indonesia

mengharumkan nama Indonesia di Homeless World Cup di kota Mexico dengan meraih juara keempat- ini adalah prestasi tertinggi Indonesia dalam dunia sepakbola di kancah dunia.



Para sketchers yang tergabung dalam Makassar Sketchers mengabadikan suasana TEDxMakassar dengan merekam berbagai momen seru dan mengharukan plus dekorasi unik nan cantik.

MAKASSAR SKETCHERS











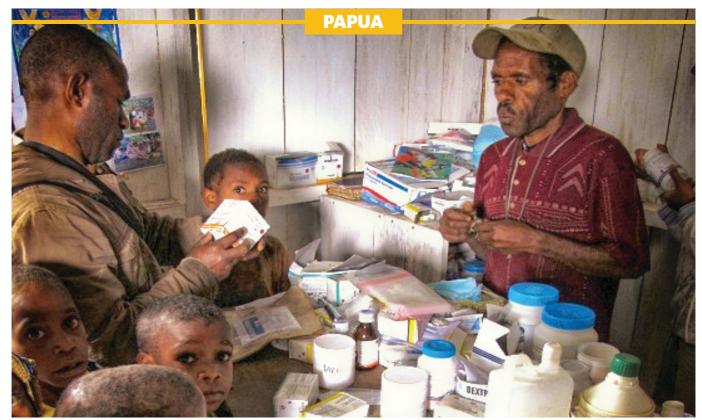


VOLUNTEER & SPONSOR

Sukses besar TEDx Makassar 2012 adalah berkat dukungan dan kerjasama banyak pihak tanpa terkecuali. Terimakasih kepada para sponsor dan volunteer acara ini yang telah memberi dan bekerja dengan

memberi dan bekerja dengan hati untuk berbagi ide-ide yang layak menginspirasi Kota Makassar.

Sampai bertemu di TEDx Makassar 2013! photos: Doc. Yayasan BaKTI _CHN



Hidup Tanpa Negara LIVING WITHOUT A STATE

OLEH BOBBY ANDERSON

MASALAH KEPEMERINTAHAN

Masalah dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, demikian pula keduanya tak terpisahkan dari berbagai masalah kepemerintahan. Di Yahukimo, kata pemerintahan saja masih perlu dijelaskan. Pemerintah di Yahukimo, bila ada, tak lain merupakan orang-orang dari klan suku Yali dan keluarga besarnya. Ini adalah sistem yang rumit. Di daerah Lolat, suku Yali terbagi atas 11 klan, Buesuk, Hwise Oholuk, Kangkin, Wom ingkik, Sukulik dindok, Sabumbo, Ngasim, Nguruni, Sahaikani, Sirik amboloak, and Suamalik. Kesebelas klan ini lalu dibagi lagi ke dalam setidaknya 41 marga

Klan-klan tersebut biasanya berperang satu sama lain, dan bahkan keluarga-keluarga dalam satu klan pun sering bertengkar satu sama lain. Kelompok-kelompok ini biasanya dipimpin oleh laki-laki, dan yang paling kuat diantaranya menjadi pemimpin di gereja, kepala desa, dan seterusnya. Mereka cenderung menegaskan wewenang dalam kelompoknya dengan paksaan dan patronase. Dalam sistem patronase, pengertian modern tentang korupsi kehilangan stigmanya: praktik-praktik korup dibolehkan untuk kebaikan masuk ke dalam sistem patronase, dimana disebarkan melalui keluarga dan klan.

Otonomi Khusus Papua (Otsus) diperkenalkan pada 2011 dengan maksud mengurangi tekanan untuk merdeka, mengatasi ketertinggalan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut juga mengakibatkan peningkatan dramatis dana bantuan pemerintah bagi tujuan-tujuan pembangunan. Namun, kelebihan staf dan birokrasi yang tidak berjalan di tingkat provinsi menyerap sebagian besar dana Otsus tersebut. Pengeluaran terbesar dari dana-dana semacam ini di daerah pedesaan dan daerah terpencil lebih pada pembangunan klinik kesehatan dan sekolah-sekolah.

Namun masalah mendasar dari layanan kesehatan dan pendidikan di daerah pegunungan bukan pada kurangnya bangunan fisik, namun pada buruknya manajemen sumberdaya manusia di Masyarakat di pedesaan Papua lebih tertarik pada layanan dasar daripada perjuangan politik.

People in rural Papua are more interested in basic services than grand political struggles

PROBLEMS OF GOVERNANCE

Problems in education and health cannot be disentangled from one another: neither can they be removed from problems in governance. In Yahukimo the actual word for governance in Indonesian (pemerintahan) requires explanation. Government in Yahukimo, where it exists, is solely the realm of the Yali tribe's clan and extended family networks and their traditions. This is a complicated system. In the Lolat area, the Yali tribe is sub-divided into 11 clans (suku): Buesuk, Hwise Oholuk, Kangkin, Wom ingkik, Sukulik dindok, Sabumbo, Ngasim, Nguruni, Sahaikani, Sirik amboloak, and Suamalik. These 11 clans are further sub-divided into a minimum of 41 extended families (marga).

The clans often go to war with one another, and even the extended families within clans operate in contention with one another. These groups are all led by men, and the strongest among them serve as church leaders, village leaders, and so on. They tend to assert their authority among their own followers by coercion and patronage. In such traditional patronage systems, modern notions of corruption lose their stigma: corrupt practices allow for goods to enter the patronage system, where it disseminates through the family and clan.

Special Autonomy (known in Papua by its Indonesian abbreviation, Otsus) was introduced in 2001 with the intention of relieving pressures for independence, alleviating Papua's underdevelopment and improving service delivery. The policy has also led to a dramatic increase in government funds

daerah-daerah ini. Gedung-gedung baru tetap kosong, dan walaupun pegawai negeri secara teoritis telah ditugaskan untuk bekerja di daerah ini, kebanyakan mereka masih tidak hadir di kantor tempat ditugaskannya. Hal ini termasuk normal di seluruh daerah pegunungan.

Ada banyak alasan ketidakhadiran berdasarkan wilayah, tetapi ada alasan yang umum. *Pertama*, pegawai negeri biasanya ditugaskan di luar daerah tempat tinggalnya, dan juga sangat resisten untuk hidup terpisah dari keluarga. Orang-orang setempat biasanya memandang remeh pegawai yang berasal dari luar karena afiliasi suku atau klan mereka berbeda dengan yang ada di daerah tempat penugasan. *Kedua*, para pegawai negeri yang mangkir biasanya tidak diberi sanksi. *Ketiga*, para pegawai ini tidak menerima gaji di tempat, juga tidak diberikan biaya transportasi dari keperluan transportasi mereka di daerah tempat ditugaskan.

Keempat, pendapatan mereka tidak memadai, biasanya karena porsi yang tersedot oleh pemerintah sebelum mereka dibayar (ini bervariasi menurut wilayah: di beberapa daerah, hal ini tidak terjadi sementara di daerah lain, sebagian besar biaya gaji salah tempat). Kelima, tidak ada struktur pendukung yang dibutuhkan: seorang guru yang ingin mengajar harus bekerja sendiri di sekolah, tanpa administrator, tidak ada guru lain, ataupun materi belajar-mengajar.

Seorang guru yang ditugaskan di daerah terpencil mungkin tidak ingin pindah bersama keluarganya karena di tempat bertugas nanti tidak ada layanan kesehatan; seorang petugas kesehatan mungkin mau pindah bersama kaluarga, tetapi di tempat baru nanti tidak ada sekolah yang berfungsi.

MEMBANGUN DESA?

Satu contoh yang menggambarkan program otonomi khusus menjadi kacau penerapannya di lapangan seperti Yahukimo adalah program bernama Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK). Dimulai tahun 2007. Dengan mentransfer dana langsung dari provinsi ke desa-desa, RESPEK berupaya untuk mengurangi lapisan kabupaten sebagaimana biasanya penyaluran dana normal dilaksanakan, karenanya menghilangkan peluang signifikan untuk menyedot dana tersebut. Idenya adalah komunitas akan membahas sendiri proyek apa yang menjadi prioritas dan lalu menggunakan dananya untuk itu. Sejauh ini, kebanyakan program yang didanai adalah infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan pusat kesehatan. Untuk semuanya itu, Pemerintah mengeluarkan tiga triliun rupiah untuk proyek RESPEK.

Walaupun program ini telah menjangkau Yahukimo, di masyarakat Lolat akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan tidak meningkat sedikitpun. Walaupun uangnya telah disalurkan ke desa-desa Lolat, orang-orang di sana masih belum mengetahui tentang metodologi berbasis masyarakat. Mereka juga tidak tau tentang pengalokasian untuk program-program perempuan. Mereka lebih memilih peluang-peluang penghidupan seperti penyediaan ternak peliharaan ketimbang infrastruktur, tapi RESPEK menciptakan infrastruktur. Di Yahukimo ini karena elit-elit lokal dalam stuktur tradisional dari 11 klan dan keluarganya masih mengendalikan proses seleksi proyek melalui interaksi langsung dengan para fasilitator RESPEK. RESPEK dengan mudah diserap ke dalam sistem Yali yang telah ada sebelumnya dengan berdasar pada patronasi, dan ini adalah penyebab lebih populernya proyek-proyek infrastruktur. Para kontraktor proyek ini adalah elit lokal dan harga bahan dan biaya biasanya berbeda dengan nilai aktual, dengan banyak uang digelapkan dan digunakan untuk hal lain.

Konsep tradisional yang menjadikan seorang pemimpin juga menentukan bagaimana uang digunakan. Di daerah dataran tinggi Yali, juga di banyak masyarakat Melanesia, peran pemimpin-juga dikenal sebagai 'orang besar'-adalah untuk membagi-bagikan kesejahteraan pada para pengikutnya. RESPEK kerap secara parsial mengisi kebutuhan para Orang Besar ini untuk mengakses dan membagi-bagikan kemakmuran, dan karenanya dana ini terus turun hingga ke akta rumput, dengan penyaluran sebesar Rp. 50.000 per keluarga per tahun, misalnya. Dan hanya karena para Orang Besar menyalurkan uang kepada pengikutnya, mereka tidak memasukkan pengikut orang besar lain ke dalamnya. Akibatnya, loyalitas suku dan marga bisa diatur ulang berdasarkan kekayaan pemimpin kelompok yang tersedia bagi para anggotanya. Ada pertarungan yang tak

available for development purposes. However, an overstaffed and underperforming provincial bureaucracy absorbs the majority of Otsus funds. The primary expenditure of such funds in rural and remote areas goes toward the visible manifestations of service: building health clinics and schools.

However, the essential problem of health and education services in the highlands is not lack of physical structures, but poor management of human resources in these areas. New buildings remain empty, and although civil servants are theoretically assigned to work in these areas, the vast majority of them are not present in their duty stations. This is the norm across the highlands.

The reasons for absenteeism are manifold and vary by area, but some generalisations can be made. First, civil servants are often assigned outside their areas of origin or residence, and so are extremely resistant to being separated from their families. Locals often look down on them because their tribal or clan affiliations differ from their areas of assignation. Second, civil servant absenteeism does not result in sanctions. Third, these civil servants are not paid on-site, nor are they provided with transportation costs reflective of the cost of transport in their assigned areas. Fourth, their salaries are not adequate, often because a portion is siphoned off by the administration before they are paid (this varies by areas: in some areas, this does not occur, whilst in others, the majority of one's wages is mislaid). Fifth, necessary support structures are not in place: a teacher who wants to teach may find herself alone in a school, with no administrator, no other teachers, and no materials. A teacher assigned to a remote area might not want to relocate her family because there is no available health care; a health care worker may not want to relocate because, chances are, there will be no functioning school.

DEVELOPING THE VILLAGES?

One example of how special autonomy programs run into trouble on the ground in places like Yahukimo is provided by the so-called Kampung Development Strategy Plan or RESPEK (Rencana Strategi Pembangunan Kampung) program. Created in 2007 by the then-Papua provincial governor, Barnabus Suebu, RESPEK is a recurring community development block grant allocation for every village in the province, funded by Otsus disbursements that are in turn funded by the returns from Papua's natural resource wealth. Under the scheme, every village in Papua gets a block grant of Rp. 100 million (about \$A10,000). Of this, 15 per cent is intended to be for projects that directly benefit women.

By transferring the funds directly from the province to villages, RESPEK is intended to eliminate the district layer through which fund disbursement would normally occur, therefore removing a significant opportunity for the siphoning of funds. The idea is that communities will discuss for themselves what projects to prioritise and spend their money on. So far, the majority of programs funded have been in infrastructure, including the construction of roads, bridges, schools, and health centres. All in all, the government has spent three trillion rupiah (about three hundred million Australian dollars) on RESPEK projects.

Despite this program reaching Yahukimo, in Lolat community access to education and health services, as well as economic opportunities, has not improved in the slightest. Though the money is delivered to Lolat's villages, Lolat's people are unaware of RESPEK's community-driven development methodology. They also know nothing of the allocation for women's projects. They rank livelihood opportunities such as the provision of livestock above infrastructure, but RESPEK creates infrastructure. In Yahukimo this is because local elites within the traditional structure of 11 clans and extended families control the project selection process through direct interaction with RESPEK facilitators. RESPEK has simply been absorbed into preexisting Yali systems based in part on patronage, and this is why infrastructure projects are popular. It is the local elites who are the contractors who work on the infrastructure programs, and the stated value of materials and costs usually differs from the

kunjung usai di antara para Orang Besar ini, dan konstituen mereka yang semakin luas menggambarkan hal ini. Pertarungan ini berlanjut ke Pemilukada, dan warga yang memilih kandidat yang kalah akan dikeluarkan dari program-program pembangunan dan bantuan lainnya sebagai hukuman.

Di Lolat, kepala desa dan kepala suku menggunakan RESPEK untuk membayar uang suap untuk kerja-kerja yang mesti dilakukan tanpa bayaran, seperti memelihara jalan dan jembatan yang menghubungkan desa-desa. Penggunaan dana ini diputuskan oleh para kepala suku yang juga bekerja sebagai kepala desa. Dana tersebut tidak digunakan untuk layani kesehatan, pendidikan, atau lainnya yang dapat membuat perubahan jangka panjang bagi kehidupan orang-orang di sana. Pemanfaatan inovatif RESPEK untuk penyediaan layanan, penghidupan dan penguatan perempuan ditemukan di berbagai tempat di Papua, kecuali di sini.

Parahnya, karena banyak sekali laki-laki yang bekerja di luar Lolat beberapa tahun lalu, kebun tradisional milik keluarga yang ditanami ubi, keladi, dan umbi-umbian, kink sudah terabaikan. Alokasi RESPEK digunakan oleh pemimpin lokal menyewa pesawat untuk membawa padi yang di distribution secara cuma-cuma. Nasi ini kemudian dimakan lalu habis, dan warga Lolat kembali terekspos ketergantungan pada pasokan makanan dari luar. Di masa lalu, setiap keluarga memiliki kebun yang menyediakan makanan pokok untuk kebutuhan seharihari. Dan karena RESPEK yang katanya berupaya untuk meningkatkan kehidupan rakyat, malah membuat mereka menjadi lebih tergantung, dan lebih beresiko.

MEMBUAT PEMERINTAH BERFUNGSI

Pentingnya mengefektifkan penyediaan layanan di Lolat, sama halnya dengan di desa-desa terpencil Papua lainnya, dimana mayoritas masyarakatnya berdiam, tidak bisa disepelekan. Kehidupan masyarakat Papua tidak mudah dan janji-janji para politisi untuk hal yang lebih baik masih belum diwujudkan. Hampir seluruh daerah dataran tinggi dimana kehadiran pemerintah hampir nihil, tidak hanya gedunggedung sekolah, yang kosong, klinik dan rumah sakit pun demikian. Pegawai pemerintah, polisi, dan tentara sangat sedikit jumlahnya dan jauh dari jangkauan. Sering kali, hanya para pendatang yang bekerja untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Papua, adalah para misionaris dari Manado dan daerah lainnya, dan jumlahnya pun tidak banyak. Karena petugas keamanan jumlahnya sangat sedikit, jumlah pemberontak pun sama: di Yahukimo, tidak ada tanda-tanda kehadiran OPM atau pemberontak lain.

Dalam dua kunjungan saya di daerah tersebut, saya tidak pernah mendengar satu pun sentimen yang melawan negara Indonesia di Lolat. Namun orang-orang di sana sering bercerita tentang kebutuhan kasat mata mereka: kebutuhan akan dokter dan guru, kebutuhan akan obat-obatan dan bahanbahan pokok lainnya. Orang-orang menunjukkan keinginan mereka untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka dan anak-anak mereka: mereka ingin anak-anaknya bisa belajar komputer dan Bahasa Inggris, misalnya. Dan saat anak-anak menyebutkan cita-cita mereka, mereka ingin menjadi guru dan dokter: tepat seperti apa yang dibutuhkan dan yang sedang kurang jumlahnya.

Populasi masyarakat pedesaan Papua adalah penonton untuk intrik politik dan aspirasi elit lawan yang berada jauh di atas mereka yang membuat mereka bahkan menjadi bagian dari dunia roh. Hingga kini, belum ada politisi yang berbicara untuk kepentingan orang-orang ini. Orang Lolat mengetahui kejadian-kejadian di Jayapura dan daerah lain yang lebih jauh, namun belum tertarik. Dalam jangka panjang, opini dan loyalitas lah yang diperebutkan. Ke mana mereka akan menjadi loyal akan tergantung pada apakah negara yang berfungsi dapat memberi manfaat yang nyata bagi mereka.

actual value, with much of the funding being skimmed off and used elsewhere.

Traditional concepts of what makes a leader also determine how this money is utilised. In the Yali areas of the highlands, as in much of Melanesian society, the role of a leader-often known as a 'Big Man'-is to disseminate wealth to followers. RESPEK often partially fills the need of Big Men to access and then disseminate wealth, and therefore, this funding does trickle down to the grassroots, with funding translating into Rp. 50,000 (\$A5) per household per year, for example. And just as Big Men disseminate such wealth to followers, they exclude the followers of others. As a result, suku and marga loyalties can be rearranged based upon the wealth their leading members make available to followers. There exists a constant battle among Big Men, and their expanding and constricting constituencies reflect this. These battles extend into elections, and suku or marga that vote for the losing candidate will find themselves cut off from development programs and other assistance as punishment.

In Lolat, village and clan leaders use RESPEK to pay pocket money for work that used to be done for free, such as maintaining the runway and trails that connect villages. This use of the funds was decided upon by those clan leaders who also serve as village leaders. The funds are not being used for health, education, or other services which might make a real long-term difference to the lives of ordinary people there. Innovative uses of RESPEK for service delivery, livelihoods and women's emplowerment are found elsewhere in Papua, but not here

To make matters worse, because so many men were working outside of Lolat in previous years, traditional gardens that families maintained to grow yams, tubers, and other staples, have been neglected. The last RESPEK allocations were used by local leaders to charter planes to fly in rice, which was then distributed freely. This rice was eaten through and ran out, and Lolat's communities are now dangerously exposed to the possibility of dependence on such imported foods. In the past, families maintained gardens that provided them with the staple foods that they needed. And so RESPEK, which was intended to deliver improvements to people's lives, has instead made them more dependent, and more exposed to risk.

MAKING GOVERNMENT WORK

The importance of effective service delivery in Lolat, as in Papua's other rural and remote areas, where the majority of the population lives, cannot be underestimated. The lives of people in Papua are not easy and politicians' promises to make things better have not been realised. Across large parts of the highlands there is little evidence of the state, other than empty schools, health clinics and hospitals. Civil servants, police, and military are few and far between. Often the only outsiders who identify with, and work to improve the lives of, Papuans, are religious missionaries from Manado and further afield, and there are not many of them. Just as security actors are rare, so are the rebels: in Yahukimo, there is no OPM or other insurrectionist presence.

During my two visits to the area, I did not hear a single sentiment expressed for or against the Indonesian state in Lolat. But people talked a lot about their palpable needs: the need for doctors and teachers, the need for medicines and materials. People expressed a desire for a better future for themselves and their children: they want their children to understand computers and learn English, for example. And when children articulate what they wish to become, they speak of becoming teachers and doctors: exactly the people their communities both need and lack.

Papua's rural population is the purported audience for the political machinations and aspirations of the opposing elites who exist so far above them that they might as well be a part of the spirit world. So far, no politicians speak for these people. Yet Lolat's people know of events in Jayapura and further afield, even if they are not yet much interested in them. In the long term, their opinions and loyalties are up for grabs. Where they direct those loyalties will depend much on whether a functioning state can be built that tangibly benefits them.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Bobby Anderson (rubashov@yahoo.com) works on health, education, and governance projects in Eastern Indonesia, and he travels frequently in Papua province. Inside Indonesia 110: Oct-Dec 2012 http://www.insideindonesia.org/current-edition/living-without-a-state

IPS adalah proyek kerja sama antara Canadian International Development Agency (CIDA) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pelaksanaannya dikelola oleh Cowater International Inc. Proyek ini merupakan program bantuan hibah yang dalam pelaksanaannya dana hibah tersebut dibagi dalam 3 kelompok pembiayaan, yaitu untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, untuk membangun kapasitas KPK dan untuk mendokumentasi-kan dan menyebarluaskan informasi praktek-praktek terbaik dan pelajaran yang dipetik dari semua kegiatan proyek.

Secara formal proyek ini mulai dilaksanakan di daerah pada tanggal 26 September 2011 saat ditandatanginya Surat Kesepahaman Teknis Pelaksanaan Proyek oleh masing-masing Kepala Daerah lokasi proyek dengan Cowater selaku konsultan pelaksana yang disaksikan oleh Komisioner Bidang Pencegahan KPK dan masing-masing Ketua DPRD dari peserta pelaksana proyek.

TUJUAN PROYEK SIPS ADALAH:

- Mengidentifikasi, melaksanakan dan memperagakan praktekpraktek pencegahan korupsi yang lebih baik berkaitan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik.
- Memperkuat peran KPK sebagai katalis dan mentor untuk inisiatif pencegahan korupsi di pemerintah daerah (Kota/Kabupaten/ Provinsi)

KELUARAN PROYEK SIPS YANG DIHARAPKAN ADALAH:

- Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di provinsi /kabupaten/kota lebih dengan transparan dan akuntabel,
- Kapasitas KPK untuk mempengaruhi perubahan pelaksaan tata kelola pemerintahan dalam pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, dan,
- 3 Adanya lingkungan yang lebih memungkinkan untuk mengurangi korupsi melalui peningkatan kesadaran, pencegahan korupsi dan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

FOKUS PENGUATAN

Tindakan anti-korupsi, tepatnya pencegahan tindakan korupsi merupakan inti kegiatan dari proyek SIPS. Dalam pelaksanaannya di daerah SIPS fokus pada peningkatan tiga komponen, yaitu:

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam banyak hal dikenal juga dengan sebutan pelayanan satu atap meskipun secara prinsip dua istilah tersebut sangat berbeda.
- Pelayanan administrasi kependudukan.
- Pelayanan pengadaan barang dan jasa.

SUPPORT TO INDONESIA'S ISLANDS OF INTEGRITY PROGRAM FOR SULAWESI



Rancangan keseluruhan kegiatan mempertimbangkan tata aturan Pemerintah Pusat dan SIPS, akan membantu mitra untuk mengimplementasikannya dengan tepat dan efektif.

LOKASI PROYEK

Hasil dari sarasehan rencana proyek yg dilaksanakan pada Agustus 2010 di Makasar dan Manado, terdapat dua puluh (20) Kabupaten/Kota menyatakan berminat menjadi peserta proyek SIPS. Namun karena sumber daya untuk melaksanakan proyek terbatas maka 20 peserta yang berminat disaring menjadi 10 peserta. Untuk menentukan kabupaten/kota yang menjadi peserta, Proyek SIPS melakukan penilaian lapangan pada November 2010 untuk mengkonfirmasi data calon peserta yang mengajukan diri.

Kunjungan yang dilakukan untuk memperkuat penilaian yang telah dilakukan berdasarkan pada kelengkapan administrasi calon peserta, nilai PIAK (Penilaian Inisiatif Anti Korupsi) KPK, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan pembangunan Kab/Kota, kebijakan gender dan lingkungan hidup serta program yang terdapat di Kab/Kota, dan sejauh mana keberadaan kegiatan Lembaga Donor International dilaksanakan di lokasi calon peserta, serta tingkat komitmen politik pimpinan daerah calon peserta, serta aksesibilitas geografis.

Atas dasar beberapa kriteria tersebut di atas, sepuluh (10) peserta dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dan Selatan terpilih menjadi peserta dalam pelaksanaan proyek SIPS, yaitu:

SULAWESI SELATAN

Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Kabupaten Enrekang Kabupaten Pinrang Kabupaten Tana Toraja

SULAWESI UTARA

Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado Kabupaten Minahasa Kota Bitung Kabupaten Sangihe

Namun demikian, calon peserta yang tidak terpilih masih memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat dari proyek SIPS melalui pengembangan pengetahuan, diseminasi praktek tata kelola pemerintahan yang baik dan lokakarya maupun pertemuan regional tahunan serta pelaporan kemajuan program serta keberhasilan dan tantangan dari berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan.

PENGELOLA PROYEK

Proyek SIPS dikelola oleh Cowater Canada yang dipimpin oleh Direktur Proyek yang berkedudukan di Jakarta dan didukung oleh 2 Project Officer yang ditempatkan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Masing-masing Project Officer akan didukung oleh seorang Project Liaison Officer, seorang Deputy Project Liaison Officer dan seorang asisten administrasi.

Komunikasi dan informasi tentang pelaksanaan proyek dapat dilakukan di alamat berikut. Sedangkan komunikasi melalui surat elektronik dan laman sedang dalam pengembangan dan segera dipublikasikan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Wisma Metropolitan I, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 T. 021-520 6207 F. 0411-872 829 Email: info@sips.or.id



etelah menyelesaikan program Pendidikan Dasar Terdesentralisasi (Decentralized Basic Education) atau lazim disebut DBE USAID, 2005-2011, USAID melanjutkannya dengan program USAID PRIORITAS. Program hibah lima tahun USAID ini dilaksanakan sesuai kesepakatan Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia, dan dirancang untuk meningkatkan perolehan pendidikan dasar berkualitas di Indonesia.

USAID PRIORITAS (*Prioritizing Reform,Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students*) dimulai pada bulan Mei 2012 dan melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pendidikan dengan pendekatan secara menyeluruh. Lewat kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder pendidikan di tingkat nasional dan daerah,program ini menyasar terwujudnya:

- Peningkatan kualitas dan relevansi pembelajaran di kelas;
- Peningkatan tata kelola dan manajemen pendidikan di sekolah dan kabupaten/kota,dan,
- Peningkatan dukungan koordinasi di dalam dan antar sekolah, lembaga pendidikan/pelatihan guru dan pemerintah di semua jenjang.

FOKUS KEGIATAN

Bermitra dengan LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) USAID PRIORITAS bermitra dengan LPTK untuk meningkatkan kapasitas dalam melakasanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru pra dan dalam jabatan, serta membantu kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen pendidikan. Kegiatan utamanya:

- Melibatkan LPTK dalam merancang dan melatih guru pra dan dalam jabatan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di satuan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs, serta meningkatkan kepemimpinan di sekolah;
- Pelatihan staf pendidik LPTK dalam memanfaatkan bahan-bahan pelatihan yang dikembangkan oleh program USAID PRIORITAS guna mendukung program pendidikan guru berkualitas baik pra maupun dalam jabatan;
- Mendukung pengembangan kurikulum pendidikan/pelatihan guru pra dan dalam jabatan serta ketersediaan bahan, sumber, dan fasilitas pendidikan/pelatihan guru;
- Membangun kemitraan antara LPTK dan sekolah untuk menyediakan pengalaman praktik mengajar yang baik bagi mahasiswa calon guru;
- Mendukung LPTK untuk mengembangkan perannya dalam menyediakan pelatihan guru dalam jabatan bagi kabupaten/kota.

LINGKUP SEKOLAH

USAID PRIORITAS bekerja sama dengan LPTK, Lembaga Pejamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan lembaga-lembaga pelatihan atau penjamin mutu lainnya, yang relevan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan



pembelajaran di sekolah-sekolah di daerah mitra. Kegiatan utamanya meliputi:

- Mengembangkan kemampuan fasilitator daerah untuk melatih pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam hal metode pembelajaran, manajemen, dan tata kelola;
- Meningkatkan kemampuan pengawas, kepala sekolah, guru dan komite sekolah melalui kunjungan sekolah, pelatihan, kegiatan gugus sekolah, dan pendampingan di sekolah oleh fasilitator daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas sekolah, USAID PRIORITAS menggunakan pendekatan "pengembangan sekolah secara menyeluruh"yang berarti:

- Semua warga sekolah akan terlibat: guru, kepala sekolah, masyarakat, dan siswa;
- Semua aspek pengembangan sekolah akan ditangani, termasuk praktik-praktik pendidikan yang baik dalam pembelajaran, manajemen sekolah, dan partisipasi masyarakat.

Di tingkat sekolah program ini memiliki fokus untuk peningkatan: (1) Kelas Awal SD/MI: khususnya dalam kemampuan Membaca dan Matematika; (2) Pendidikan Sains (IPA); (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan; (4) Pengelolaan pendidikan inklusi dan kesetaraan: transisi dari SD/MI ke SMP/MTs, anak-anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak, jender, dan budaya sehat.

LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

USAID PRIORITAS bekerja dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk:

- Mendukung pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan, penganggaran, dan pengembangan kebijakan.
- Meningkatkan hubungan antar sekolah, kabupaten/kota, provinsi,LPTK,dan pemerintah pusat.
- Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola pendidikan

DAERAH DAN MITRA

Program ini bekerja secara bertahap di 100 kabupaten/kota di 10 propinsi, meliputi 42 kabupaten/kota ex daerah DBE, dan 60 kabupaten/kota baru mitra Prioritas. Tahap awal bekerja di 60 kabupaten/kota mitra di Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pengembangan wilayah program akan dimulai pada tahun 2014, akan mencakup Propinsi Papua, NTB, NTT, dan daerah lainnya yang akan ditentukan kemudian.

Di Sulawesi Selatan proyek ini bekerja di 12 kabupaten kota: 9 kabupaten/kota ex DBE, Jeneponto, Makassar, Pangkep, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, dan Palopo, dan 3 kabupaten baru

Prioritas, Bantaeng, Maros, dan Wajo.

USAID PRIORITAS BERMITRA DENGAN:

18 LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) untuk meningkatkan kapasitas dalam hal peningkatan kualitas program pelatihan/pendidikan guru baik pra maupun dalam jabatan.

Lebih dari 1.400 SD/MI dan SMP/MTs di 60 daerah mitra untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menjangkau 20.000 guru dan lebih dari 300.000 siswa.

Lebih dari 100 kabupaten/kota, termasuk 50 kabupaten/kota yang sebelumnya terlibat dalam program DBE USAID, untuk mendukung diseminasi praktik yang baik, yang menjangkau sekitar 4.000 sekolah, 30.000 guru, tenaga kependidikan, masyarakat dan 825.000 siswa.

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN

USAID PRIORITAS didasarkan pada praktik pendidikan yang baik dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, yang meliputi:

- Membangun dan memperkuat kapasitas penyedia layanan setempat (LPTK, pengawas sekolah, fasilitator pelatihan, dll) untuk memfasilitasi pelaksanaan dan penyebarluasan praktik pendidikan yang baik.
- Memastikan bahwa semua program dan kegiatan mendukung kebijakan pemerintah.
- Menggunakan pendekatan "pengembangan sekolah secara menyeluruh dan mengintegrasikan pengembangan pembelajaran, manajemen, dan tata kelola.
- Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas dan cara kerja system yang ada seperti pengawas, kepala sekolah, kelompok pengembang-an professional (KKG, MGMP, KKKS, KKPS) dan institusi pendidikan/pelatihan guru.
- Menggunakan perangkat data yang ada (seperti Dapodik) dan instrumen/alat untuk membantu menganalisis data dalam pengembangan kebijakan.
- Berkoordinasi dan berbagi sumber daya dengan mitra pembangunan dan program lainnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

HAMSAH

Communication Specialist - South Sulawesi Jl. Salemba Raya No. 75 - 77, Gunung Sahari baru, Makassar 90222

Phone: 0411-886898 Mobile: 08114600499

Email: hamsah@prioritas.or.id www.prioritaspendidikan.org

DI BALIK KAMPANYE

Menyajikan ide dengan cara menyenangkan!

OLEH MILA SHWAIKO



omunikasi pembangunan dituntut untuk memiliki kepekaan di tempat tertentu. Hal ini artinya proses ini harus bisa beradaptasi dengan kultur, bahasa, kondisi lokal, kebiasaan media lokal dan lain sebagainya. Tidak ada istilah strategi komunikasi yang sama disemua tempat.

Hal ini sepertinya adalah sesuatu yang sangat dikenal oleh semua orang yang khususnya bekerja di Kawasan Timur Indonesia dan masalah ini semakin diperburuk oleh isu geografis dan infrastruktur komunikasi yang buruk di setiap daerah.

Tidak ada komponen komunikasi dua arah yang nanti dikembangkan akan memiliki proses yang sama, semua akan disesuaikan agar sesuai dengan target, tujuan program, ketersediaan dana dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, tetapi dengan mengasah pengalaman, belajar dari proses atau penggunaan produk komunikasi yang maksimal akan menjadi sama dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan.

Sehingga dari hal ini ada peluang dan kebutuhan untuk para praktisi di Komunikasi Pembangunan (khususnya untuk mereka yang bekerja di KTI) untuk bersama-sama bertemu dan berbagi pengalaman. Ada kesadaran juga untuk selalu belajar dan berkembang, khususnya untuk teknologi baru dan model berkomunikasi.



Acara ini disebut sebagai 'bengkel' karena bukan hanya sebagai suatu acara seperti workshop, seminar atau pelatihan tetapi sesuatu proses yang menyediakan kepada pesertanya sebuah perangkat baru yang bisa digunakan dalam program setelah mendengar dan menyerap beberapa contoh kasus praktikal dari rekan-rekan praktisi lainnya.

BENGKEL KOMUNIKASI PEMBAGUNAN EFEKTIF III

Setelah pelaksanaan bengkel pertama yang membahas soal konsep komunikasi pembangunan dan bagaimana meramu strategi komunikasi pembangunan yang efektif dan bengkel kedua yang membhasa peran film dan audio-visual, Bengkel 3 kembali dilaksanakan. Mempertahankan model pelaksanaan bengkel 1 dan 2, namun lebih fokus membahas lebih dalam hal yang praktikal dalam komunikasi pembangunan. Pilihan tema bersumber dari diskusi dan pembelajaran yang muncul dalam



pelaksanaan bengkel pertama, kedua dan FGD yang pernah dilaksanakan di BaKTI.

Soft campaign atau terjemahan bebasnya, kampanye halus, mungkin masih terasa baru. Tapi dari berbagai pengalaman belakangan ini semakin banyak orang percaya, kalau ini adalah satu cara efektif untuk menyampaikan pesan dan memengaruh orang banyak.

'Soft campaign' menggunakan pendekatan-pendekatan kreatif yang menyenangkan bagi banyak orang. Ini termasuk lobby, petisi, dan orasi yang melibatkan pentas musik, film pendek, puisi, dan tari dalam suasanya yang positif dan apresiatif. Soft campaign bertitik berat bagaimana menyajikan ide, membuat audiens tidak hanya memahami maksud, tapi juga terkesan dan termotivasi.

Bengkel Komunikasi III mengangkat rahasia di balik kampanye yang sukses. Narasumber Bengkel Komunikasi berbagi trik bagaimana memenangkan hati audiens dengan penyajian ide yang keren. Retha Dungga, Communication Officer Transparency International Indonesia dan pendiri SPEAK!; Illian

Deta Artasari, Public Campaign Coordinator, Indonesia Corruption Watch; dan Farid Satria, Pagolo Football Club, 3 narasumber Bengkel Komunikasi III, berbagi pengalaman mereka dengan 25 peserta, termasuk mahasiswa, staff komunikasi dari program pembangunan, staff LSM dan staff universitas di Makassar.

Dalam sesi seperti "Melawan Stigma dengan Sepak Bola" (Farid Satria-Pagolo Football Club); "Di Balik Cicak & Buaya" (Illian Deta Arta Sari-Indonesia Corruption Watch) dan Identifikasi Pesan Kunci untuk Kampanye (Retha Dungga-Transparency International Indonesia), narasumber menyampaikan tips dan tricks sederhana tapi efektif, termasuk:



- cara mebuat kampanye simpatik dan non sadistik
- cara cari funding dengan kreativitas (seperti jual kaos, merchandise, crowdfunding)
- menggunakan bahasa down-to-earth (sekali baca, tidak harus pikir)
- membangun jaringan yang kuat dengan lembaga dalam sector sama (anti korupsi, lingkungan, gender)
- buat kampanye social media tetapi selalu ingat social media tentang orangnya, bukan alatanya
- cari champion dan sosok postif dalam setaip kampanye
- belajar dari dunia advertising
- jangan tergantung mainstream media- blogs, twitter, petisi lebih efektif
- menjaga komunikasi dengan donatur, memberi apriasi kepada mereka
- menggunakan data supaya pesan kampanye lebih kuat
- Isu itu selalu cross-sector- cari pesan yang paling umum tapi bermakna
- Kerjasama dengan anak muda (40.6 juta di Indonesia) dan menejermahkan isu isu untuk anak muda
- Menentukan semua orang di lembaga Anda mampu menjelaskan identitas lembaga
- Menggunakan sumberdaya local, tradisi lokal (dongeng) dan platform lokal



peserta dapat kesempatan untuk langsung bertanya dan dapat wawasan baru tentang kampanye terkenal di Indonesia seperti kampanye anti-korupsi dari KPK dan kampanye Indonesia ikut World Homeless Cup 2012 di Mexico.

Online Tools untuk **Soft Campaigning**

Change.org

"Change.org adalah platform petisi terbesar di dunia, memberdayakan orang di mana pun untuk menciptakan perubahan yang ingin mereka lihat.

Terdapat lebih dari 20 juta pengguna Change.org di 196 negara, dan setiap hari orang menggunakan alat kami untuk mentransformasi komunitas mereka - secara lokal, nasional dan global. Apakah itu perjuangan seorang ibu melawan bullying di sekolah putrinya, pelanggan yang mendesak bank untuk membatalkan biaya yang tidak adil, atau warga negara yang menuntut pejabat korup bertanggungjawab, ribuan kampanye yang dimulai oleh orang-orang seperti Anda telah menang di Change.org - dan akan lebih banyak lagi kemenangan setiap minggunya.

Kita hidup di zaman yang menakjubkan, ketika kesempatan untuk membuat perbedaan lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. Mengumpulkan orang di balik kepedulian pada waktu dahulu sulit, memerlukan banyak waktu, uang, dan infrastruktur kompleks. Namun teknologi telah membuat kita lebih terhubung dari sebelumnya.

Sekarang ini memungkinkan bagi siapa saja untuk memulai sebuah kampanye dan segera menggalang ratusan orang lainnya secara lokal atau ratusan ribu di seluruh dunia, membuat pemerintah dan perusahaan lebih responsif dan akuntabel.

Kami ingin mempercepat pergeseran dramatis ini - dengan membuatnya lebih mudah untuk membuat perbedaan, dan dengan menginspirasi semua orang untuk menemukan apa yang mungkin ketika mereka berdiri dan bersuara.

Kami sedang bekerja untuk sebuah dunia di mana tak seorang pun tak berdaya, dan di mana menciptakan perubahan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Kami baru saja memulai, dan kami berharap Anda akan bergabung dengan kami"

Wujudkan.com

Sebuah situs **crowdfunding** untuk industri kreatif Indonesia.

"Kami adalah sekelompok orang yang ingin melihat industri kreatif Indonesia berkembang pesat, karena kami percaya Indonesia tidak kekurangan daya cipta, tapi yang kurang adalah sistem dukungan untuk para kreator kita berkarya.

Wujudkan.com adalah sebuah website untuk artis, seniman dan kreator Indonesia mendapatkan dukungan dari kita semua untuk mewujudkan karya kreatif mereka. Kami percaya kreativitas akan berkembang baik jika kita semua mendukungnya.

Apakah kamu punya ide karya yang membutuhkan dana? Atau kamu ingin melihat karya kreatif Indonesia berkembang pesat? Ikuti terus perkembangan kami melalui wujudkan.com, FB page ini dan twitter @wujudkanID

Ayo bersama dukung karya anak bangsa dengan bergabung menjadi kreator, donatur, atau suporter di wujudkan.com. Partisipasi kalian adalah masa depan bangsa Indonesia!

Nge-bloglah maka Kau Ada

ernah dengar istilah Blog, Blogging atau Blogger kan? Kalau menurut Wikipedia blogging adalah singkatan dari web log, bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum dan dapat diakses oleh semua pengguna internet. Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam,dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan.

Bahkan saat ini blog menjadi media bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan.

Bagi orang yang memiliki hobi menulis dan bercerita atau berbagi informasi, blog adalah salah satu media yang tepat untuk menyalurkannya. Tidak salah kiranya jika Sahabat BaKTI memilih tema "Nge-bloglah maka Kau Ada" untuk menggambarkan hubungan erat antara menulis dan mempublikasikannya dalam sebuah blog.

BaKTI mengadakan pelatihan blogging khusus untuk Sahabat BaKTI tanggal 3 November 2012. Pelatihan ini termasuk pengenalan Blog dan praktek pembuatannya; jenis-jenis blogger dan tulisan; dan berbagi pengalaman dengan blogger.



BERIKUT ADA DUA BLOG POST DARI PESERTA PELATIHAN BLOGGING

Punya Blog Itu Asyik

OLEH ABD. RAHMAN RAMLAN

DISTRICT FACILITATOR CARE INDONESIA

"Membuat Blog itu sebenarnya mudah, yang sulit itu menjaga konsistensi mengisinya." kata Ipul, panggilan akrab Syaifullah Daeng Gassing Blogger Senior Anging Mammiri, dihadapan peserta Pelatihan Pembuatan Blog, di kantor BaKTI, 3 November 2012.

Sumarni Arianto, mewakili BaKTI dalam pengantar Pembukaan Pelatihan Blog menyampaikan harapannya, kiranya pelatihan Blog dapat memberikan manfaat bagi para anggota Sahabat BaKTI.

"Kegiatan Pelatihan merupakan salah satu Agenda Bakti untuk Sabahat BaKTI (istilah untuk anggota BaKTI), agar para anggota BaKTI bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman."ungkapnya. "Oleh karena itu, diharapkan kepada sahabat BaKTI yang mengikuti pelatihan ini, kiranya berkenan mengirimkan tulisannya tentang pengalaman mengikuti kegiatan pelatihan Blog untuk dimasukkan ke BaKTI News yang terbit setiap bulan, agar kegiatan sahabat BaKTI dapat diperkenalkan lebih luas," tambahnya.

Bertempat di ruang Perpustakaan BaKTI, sebanyak kurang lebih 25 orang peserta pelatihan dari berbagai kalangan seperti aktivis LSM, Pegawai Pemerintah, Mahasiswa bahkan orang Biasa mengikuti Pelatihan Blog yang di selenggarakan oleh BaKTI dengan tema "Nge-bloglah maka Kau Ada".

"Ternyata punya Blog itu asyik, selain sebagai wadah mengekspresikan diri, dapat juga membangun jaringan pertemanan," kata Rahman salah seorang aktivis LSM yang sangat gembira berkesempatan ikut pelatihan.

Namun bukan hanya itu manfaatnya, menurut Ipul yang bertindak sebagai narasumber utama, bahwa Blog juga digunakan oleh sebagian orang untuk mencari keuntungan.

Blog:pnktrahman.wordpress.com

Posting Pertamaku di Pelatihan Blog BaKTI

OLEH ANDI BUNGA TONGENG

eorang teman mengirim pesan singkat beberapa hari yang lalu, "Katanya mau ikut pelatihan blog di BaKTI. Sudah 24 orang yang terdaftar. Kuota cuma 30 orang. Ayo cepat kirim email konfirmasi sekarang juga".

Spontan buyar konsentrasiku di pertemuan review penawaran sekolah-sekolah, bersama teman-teman Bappeda dan Dinas PU. Beberapa kali mencoba mengakses email lewat HP tapi tidak berhasil, sinyal benar-benar sedang lemah pagi itu. Mungkin kah kuota sudah penuh?, saya sudah mulai gelisah.

Tidak putus asa begitu saja, saya tinggalkan ruang pertemuan untuk segera menelpon ke teman. Memintanya untuk mendaftarkan saya menggunakan alamat emailnya. Sepuluh menit kemudian, teman saya mengirim pesan singkat, Berhasil. Sahabat BaKTI sudah mengirimkan list peserta. Namamu terdaftar. Lega rasanya.

Sebenarnya sudah beberapa kali diajak untuk ikut pelatihan serupa oleh teman, tapi selalu saja ada halangan. Kali ini saya

tidak mau melewatkan kesempatan. Apalagi pelaksanaannya di hari libur kerja. Beruntung bisa bergabung menjadi sahabat BaKTI.

Pelatihan Blog, Nge-Bloglah, Maka Kau Ada diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2012 di kantor BaKTI. Dilatih oleh Ipul Daeng Gassing. Salah seorang Blogger senior dari komunitas blogger Anging Mamiri.

Materinya meliputi apa itu blog, jenis-jenis blog, penyedia layanan blog, tips membuat blog, hingga praktek langsung membuat blog.

Akhirnya bisa buat blog dan posting pertama, batinku. Memang benar apa yang dikatakan oleh Daeng Gassing, buat blog itu mudah, menjaga konsistensi yang sulit. Membuat blog tapi jarang posting tulisan, tentu membuat blog tidak efektif. Agar bisa menjaga konsisten, maka nge-Blog harus fun dan sesuai passion, daeng Gassing melanjutkan.

Bukan hanya cara membuat blog dan beberapa trik yang diberikan pada pelatihan ini. Daeng Gassing juga menyampaikan beberapa etika dalam nge-blog. Salah satunya adalah tatkala kita membuat postingan yang mengundang polemik, dan ada yg komentar kontra, maka jangan sekali-kali menghapus komentar tersebut. Akan jauh lebih baik membuat postingan baru dan mengakui jika ternyata opini kita pada postingan sebelumnya salah.

Engage Media

MOVIEMENTO

Training Video untuk Anak Muda dengan Perspektif Anti-korupsi Video Training for Youth with an Anti-corruption Perspective

ekerja sama dengan Transparency International Indonesia (TI-Indonesia), EngageMedia meluncurkan 'Moviemento', serangkaian training video. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih anak-anak muda yang sudah melakukan kampanye beberapa isu seperti gender, lingkungan, pembangunan sosial, dan budaya untuk membuat sendiri video yang mengandung pesan-pesan anti korupsi dari perspektif anak muda.

Beberapa tahun terakhir, TI-Indonesia telah melatih anakanak muda di Jakarta, Indonesia, bahwa korupsi bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di sektor pemerintahan, namun juga terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Pada tahun 2013, EngageMedia bekerja bersama Tl-Indonesia untuk menyusun dan melaksanakan program-program pelatihan yang akan memberikan keterampilan media digital yang dibutuhkan untuk menghasilkan cerita dan dan memroduksi video bagi para peserta yang terpilih. Para peserta ini kemudian akan mampu berbagi kisah tentang gerakangerakan anti-korupsi di dalam komunitasnya dan berbagi visi perubahan sosial untuk lingkungan yang bebas dari korupsi.

Sebagai awal, staff EngageMedia dan TI-Indonesia (disebut Tim Moviemento), mengadakan empat Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussions - FGD) bersama komunitas-komunitas anak muda di empat kota. Diskusi ini didesain untuk mendapatkan pandangan dari komunitas anak muda, pengetahuan mereka, dan perspektif mereka tentang korupsi, dan literasi media. Diskusi-diskusi ini juga adalah sebuah cara untuk mengetahui dan memutuskan kota mana yang cocok untuk pelaksanaan pelatihan video.

Kota pertama yang dikunjungi adalah Makassar, pada tanggal 14 Desember 2012. Bersama BaKTI, FGD yang dilakukan memandang partisipasi dari berbagai komunitas anak mudah di Makassar, termasuk Sekolahtanpabatas, Komunitas Sehati, Sokola Pesisir, Kampung Dongeng, Rumah Hijau, MAP, Makassar Berkebun, PNPM Hijau, PMKRI Makassar, Kiri Depan, Rumah Ide, GMKI Makassar, CEPSIS, dan QUIQUI Makassar (komunitas merajut).

Kota kedua, Semarang, kami kunjungi pada 29 Januari 2013. Bermitra dengan Pattiro, sebuah NGO yang berfokus pada advokasi kebijakan publik, FGD dilaksanakan bersama

Collaborating with Transparency International Indonesia(TI-Indonesia), EngageMedia launched 'Moviemento', a new series of video trainings. This project aims to train youth communities who are already campaigning on issues such as gender, the environment, social development, and culture, to produce their own videos that have anti-corruption messages with youth perspectives. In recent years, TI-Indonesia has been educating youth in Jakarta, Indonesia, that corruption is not only about what happens in the Government sector, but also within their immediate surroundings. Through 2013, EngageMedia aims work with TI-Indonesia to develop and conduct training programmes which will provide the selected participants the digital media skills required to be apt in storytelling and video production. These participants will then be able to tell stories about the anti-corruption movement in their own communities and spread the vision of social change for a corruption-free environment.

To start, staff from EngageMedia and TI-Indonesia (together called the Moviemento Team), are conducting four Focus Group Discussions (FGDs) with youth communities in 4 cities. These FGDs are designed to gather insights on youth communities in Makassar, Semarang, Balikpapan, and Kupang, relating to youth characteristics, their knowledge and perspectives on corruption, and media literacy. These FGDs are also a way to better assess and decide which cities have more ideal conditions for video training.

The first city visited for the FGD was Makassar, on 14 December 2012. Working together with BaKTI, this FGD saw the participation of various youth communities in Makassar, including Shkolatanpabatas, Sehati, Sokola Pesisir, Kampung Dongeng Rumah Hijau, MAP, Makassar Berkebun, Green PNPM, PMKRI Makassar, Kiri Depan, Rumah Ide, GMKI Makassar, CEPSIS, and QUIQUI' Makassar (Komunitas Merajut).

The second city, Semarang, was visited on 29 January 2013. Partnering with Pattiro, an NGO who focuses on public policy advocacy, an FGD was held with a diverse group of youth communities such as Lembaga pers Manuggal Universitas Diponegoro (UNDIP), Lembaga Hysteria, Kelompok Anak Anti ESKA, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid (JPRMI) Kota Semarang, Teater Emka UNDIP, Komunitas Suporter SNEX Kalibanger (Kaliber), and Karang Taruna Candi dan Kemijen.

komunitas anak muda yang beragam, semisal Lembaga Pers Manunggal Universitas Diponegoro (UNDIP), Lembaga Hysteria, Kelompok Anak Anti ESKA, Jaringan Pemuda dan Remajaa Masjid (JPRMI) Kota Semarang, Teater Emka UNDIP, Komunitas Superter SNEX Kalibanger (Kaliber), dan Karang Taruna Candi dan Kemijen.

Bulan Februari ini, Tim Moviemento berkunjung ke Balikpapan untuk mengadakan FGD yang ketiga. Untuk kegiatan ini, kordinator lokal STABIL mengumpulkan 18 peserta dari 8 komunitas, seperti Inspirasi Muda Kaltim, Balikpapan Berkebun, Balikpapan English Community, Anak Muda Balikpapan, Gemas Puskib, HMI, Balikpapan Blogger, termasuk STABIL sendiri.

FGD pamungkas akan diadakan di Kupang pada pertengahan Februari, yang akan diikuti dengan penilaian kotakota mana saja yang paling sesuai untuk dilaksanakannya sesi pelatihan video.

This week (February 6th 2013), the Moviemento Team visited Balikpapan to conduct the 3rd FGD. For this event, local Coordinator STABIL brought together 18 participants from 8 communities, namely, Inspirasi Muda Kaltim, Balikpapan Berkebun, English Community Balikpapan, Anak Muda Balikpapan, Gemas Puskib, HMI, Balikpapan Blogger, and STABIL itself.

The final FGD will be held in Kupang in mid-February, which will be followed by assessments of which cities are best suited to conduct our video training sessions.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi website

Engage Media: http://www.engagemedia.org/blog/moviemento-fgd



OVERVIDEO TANPA KORUPSI

FOCUS GROUP DISCUSSIONRABU 12 DESEMBER 2012

HARI ITU ADA KESIBUKAN YANG TAK BIASA DI PERPUSTAKAAN BAKTI. DUAPULUH TIGA ANAK MUDA DENGAN SEMANGAT MENGIKUTI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) YANG DISELENGGARAKAN OLEH ENGAGEMEDIA DAN TRANSPARENCY INERNATIONAL. BERIKUT BEBERAPA HAL KEREN DARI MOVIEMENTO YANG MUDA BERVIDEO TANPA KORUPSI.

"Apa yang mengganggu di Makassar?"

Imej 'Makassar itu kasar' sangat menggangu. Sumber utama pencitraan ini adalah media massa yang mempublikasikan secara berlebihan atas kejadian chaos yang dilakukan oleh segelintir pihak saja.

"Bagaimana dengan baliho pilkada?"

Seluruh peserta mengekspresikan ketergangguan mereka atas pemasangan beragam baliho yang menjadi sampah visual di kota Makassar. Selain baliho, juga banyak spanduk yang dipaku di pohon-pohon. Ini jelas-jelas melanggar peraturan.

Ternyata ada satu daerah di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng namanya, yang memiliki larangan memasang baliho pilkada.

Sudah saatnya kita memerhatikan etika berpublikasi.

"Pendapatmu tentang politisi?"

Orang idealis yang hilang idealismenya.

"Pemahaman tentang integritas"

Integritas bisa hilang saat berpolitik. Jika politisi memiliki integritas, tidak ada yang namanya praktik korupsi.

"Mengapa korupsi terjadi?"

Korupsi bisa terjadi karena adanya kebiasaan membiarkan hal-hal / perilaku yang buruk. Pandangan biasa terhadap praktik korupsi terkecil dalam kehidupan sehari-hari menjadi bibit untuk membolehkan hal apapun yang salah.

"Apakah media massa selalu bisa dipercaya?"

Tidak! Karenda media sekarang banyak yang dimanipulasi berdasarkan kepentingan pihak-ihak yang terlibat di media tersebut.

"Semua orang bisa memiliki media?"

Setuju, sebagai medium berbagi ilmu kepada khalayak

"Menciptakan media itu sulit?"

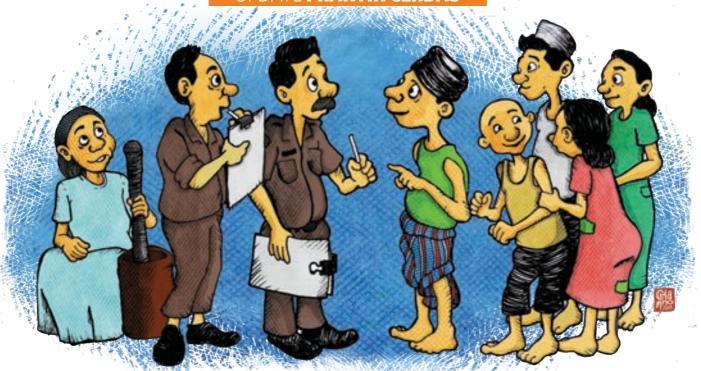
lya! Karena pertanggungjawabannya sangat tergantung pada integritas.

"Bagaimana penggunaan video dalam komunitasmu?"

Masyarakat kurang berminat pada media TV karena kontennya jelek. Orang Makassar bukannya tidak suka nonton TV, tapi lebih suka hal-hal populer yang tidak selalu hadir di TV.

KOTA PERTAMA YANG DIKUNJUNGI ADALAH MAKASSAR, PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2012. BERSAMA BAKTI, FGD YANG DILAKUKAN MEMANDANG PARTISIPASI DARI BERBAGAI KOMUNITAS ANAK MUDA DI MAKASSAR, TERMASUK SEKOLAHTANPABATAS, KOMUNITAS SEHATI, SOKOLA PESISIR, KAMPUNG DONGENG, RUMAH HIJAU, MAP, MAKASSAR BERKEBUN, PNPM HIJAU, PMKRI MAKASSAR, KIRI DEPAN, RUMAH IDE, GMKI MAKASSAR, CEPSIS, DAN QUIQUI MAKASSAR (KOMUNITAS MERAJUT).

UPDATE **PRAKTIK CERDAS**



MENGEMBALIKAN Anak ke Sekolah

OLEH SUMARNI ARYANTO

Jumlah

Anak

11

8

438

350

281

2.316

3.404

Sumber Dukungan

Komite sekolah

Dana Amil Zakat

APBD Kab.Polman

APBD prov. Sulbar

APBD kab.Polman

APBD Kab.Polman

dan APBD Prov.Sulbar

Tahun

2004

2005

2007

2008

2011

2012

Total

asih ingat dengan kisah Ernia anak berumur 13 tahun yang harus meninggalkan bangku sekolah dan mengurusi empat orang adiknya setelah ditinggal oleh orang tuanya di Polman? Kisah Ernia sempat santer diberitakan baik oleh media lokal maupun nasional sekitar pertengahan tahun 2011.

Di Polewali Mandar, ada 530 anak putus sekolah yang terdata dari kegiatan pendataan yang bertajuk SIPBM atau Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat. SIPBM adalah salah satu sistem pendataan sebagai upaya untuk membenahi data terkait bidang pendidikan yang melibatkan masyarakat dimana datanya langsung bersumber dari masyarakat sendiri sebagai pihak yang bersentuhan dan merasakan langsung masalah pendidikan. Data yang dihasilkan dari SIPBM ini tidak hanya berupa angka berapa banyak anak yang putus sekolah saja namun juga mencakup informasi penyebab putus atau berhenti sekolah, pihak-pihak yang berpotensi memberikan dukungan

supaya anak bisa kembali bersekolah dan informasi penting lainnya.

Ernia adalah satu dari 271 anak yang kembali bersekolah setelah menerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Selain beasiswa, Ernia dan adik-adiknya diadopsi oleh sebuah yayasan bernama Ratih al Kahfa. Ernia pun mendapatkan bantuan dana sebesar 250 ribu rupiah setiap bulannya dari seorang pengusaha di Yogyakarta. Bantuan dana ini langsung diberikan kepada Kepala Sekolah tempat Ernia menuntut ilmu melalui Kantor Pos Polewali.

Karena data adalah bentuk paling sederhana dari informasi dan informasi inilah yang menjadi poin penting dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Polman telah melaksanakan beberapa aksi nyata bekerja sama dengan masyarakat. Salah satunya adalah menyukseskan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 2004. Program ini memnafaatkan hasil temuan SIPBM.

Upaya yang tak kenal lelah ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Jika awalnya hanya 11 anak putus sekolah yang kembali bersekolah berkat dukungan Komite Sekolah Desa Topango, maka pada tahun 2007 sebanyak 438 anak telah mendapatkan beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Polman.

Pemerintah Kabupaten Polman kemudian memutakhirkan data-data SIPBM 2004-2007. Dari kegiatan pemutakhiran data ini, pada tahun 2011 terjaring 530 anak putus sekolah dan 271 anak di antaranya mendapatkan beasiswa dari Pemerintah untuk dapat kembali bersekolah.

Dengan dukungan Unicef melalui program transisi, tak kurang dari 6.000 anak hingga April 2012 telah kembali

bersekolah. Anak-anak ini adalah mereka yang berjenjang SD hingga SMP. Jumlah total anak yang dikembalikan ke sekolah mulai tahun 2004 dan sumber dukungan bagi kegiatan ini dapat dilihat pada tabel.

Angka-angka keberhasilan tersebut di atas tak lepas dari komitmen para pemangku kepentingan di Kabupaten Polman. Salah satu contohnya adalah pengalokasian anggaran khusus untuk membenahi data, alokasi dana APBD untuk beasiswa anak putus sekolah atau tidak bisa lanjut. Beberapa lembaga yang

mendukung inisiatif Pemkab Polman adalah UNICEF dan PNPM Generasi Sehat Cerdas.

SIPBM adalah satu dari 7 praktik cerdas terpilih pada Festival Forum KTI 2012 di Palu. Dalam acara tersebut, Bupati Polewali

BaKTINEW9	DESEMBER 2012 -	JANUARI 2013

Mandar Bapak Ali Baal tampil mempresentasikan program ini di atas Panggung Inspirasi. Bersama Bapak Ali Baal, juga ada Johanis Piterson Kabid Pendidikan Luar Sekolah kabupaten Polman dan Nehru Sagena Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Polman sekaligus juga fasilitator program SIPBM.

Menurut bapak Nehru Sagena, dengan terpilihnya SIPBM ini sebagai salah satu Praktik Cerdas yang menjawab tantangan pembangunan khususnya dalam sektor pendidikan, dapat berdampak eksternal maupun internal terhadap perkembangan program ini. Secara eksternal, keberhasilan SIPBM menginspirasi daerah lain untuk mereplikasi program ini. Salah satu di antaranya adalah tiga Kabupaten dari provinsi Aceh yang berkunjung pada pertengahan Januari tahun ini.

Selain itu, keberhasilan SIPBM Polman juga masuk dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). Siapa nyana, program ini bahkan menginspirasi dan menjadi ikon Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yang dicanangkan Wakil Presiden Budiono. Dalam acara Pencanangan GKB pada 24 November 2012 ini, sebanyak enam orang dari Polman yang telah kembali bersekolah berkat adanya program SIPBM menghadiri acara Pencanangan GKB tersebut. Kehadiran mereka adalah untuk mewakili anak-anak yang kembali bersekolah. Saat ini, sebanyak 15 Kabupaten di Indonesia, termasuk Situbondo dan Brebes di Jawa Timur, dan beberapa Kabupaten di Aceh juga akan mereplikasi program SIPBM.

Polman juga menerima kunjungan dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) untuk melihat langsung proses SIPBM dan menawarkan kerjasama dengan Polman untuk mengembangkan sistem data terpadu dalam bentuk integrasi pendataan TNP2K dan SIPBM. Pihak sektor swastapun tidak ketinggalan memberikan dukungannya dalam program ini, seperti halnya dari CSR BNI, BRI dan Bank Sulselbar serta Pengusaha yang berkomitmen untuk memberikan

bantuan berupa seragam bagi anak-anak putus sekolah di Polam, serta komitmen membantu dari pihak BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Polman.

Secara internal, banyak perkembangan yang dicapai dalam pelaksanaan SIPBM di Polman baik dalam bentuk dikeluarkannya regulasi dari pihak pemerintah kabupaten maupun aksi nyata langsung dari pelaku dilapangan serta dari pihak masyarakat sendiri. Dalam hal regulasi, telah diterbitkan Peraturan Bupati No. 14 tahun 2012 tentang wajib belajar 12 tahun dimana seluruh kepala desa dan lurah melalui ADD dan DOK wajib menganggarkan beasiswa minimal 4 orang untuk bersekolah dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan. Selain itu dijalin pula kerjasama dengan pihak media dalam hal peliputan dan publikasi serta advokasi data-data hasil SIPBM dalam bentuk forum yang bertajuk JePA atau Jurnalis Peduli Anak dan Jaringan Jurnalis MDGs (JJMDGs)

Jika ditempat lain program sejenis sudah ada, namun yang membuat SIPBM ini juga istimewa adalah telah dibuatnya tools untuk melakukan monitoring partisipatif dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil SIPBM untuk memastikan bahwa anak yang sudah dikembalikan ke sekolah tidak putus kembali dan mencegah anak yang berpotensi DO untuk dapat tetap bersekolah.

SIPBM tidak hanya tentang mengumpulan data dan memanfaatkannya namum dalam prosesnya menyelipkan makna lebih dalam, berupa penyadaran bersama bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk mendapatkan informasi mengenai Praktik Cerdas, Anda dapat menghubungi **sumarni@bakti.org**

Video Inspiratif Praktik Cerdas

i tahun 2012, 7 praktik cerdas dari sektor yang berbedabeda telah terpilih melalui proses seleksi bertahap. Ketujuh Praktik cerdas tersebut telah ditampilkan diatas panggung inspirasi festival Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) ke VI yang bertema Merajut Inspirasi Persembahan dari Timur untuk Indonesia. Kegiatan FKTI ke VI ini sendiri diadakan di Palu pada tanggal 24-25 September 2012.

Presentasi praktik cerdas yang mewakili sector pendidikan, gender, pemuda, kesehatan, lingkungan, ekonomi local dan tata pemerintahan sukses menginspirasi para peserta forum KTI VI lalu, melalui tampilan para praktisinya yang dikemas aktraktif diatas panggung dengan dukungan visualisasi kegiatan berupa video singkat liputan masing-masing praktik cerdas.

Untuk anda yang tidak sempat merasakan euphoria perayaan kemajuan pembangunan di KTI melalui tampilan ke tujuh praktik cerdas tersebut, anda tidak perlu khawatir. BaKTI telah mendokumentasikan praktik cerdas inspiratif tersebut

dalam bentuk video singkat yang bisa anda saksikan pada link berikut:

http://www.youtube.com/user/BaKTIFoundation?feature=mhee

Membatasi Daerah Penangkapan Ikan, Menjadikan Tangkapan Lebih Banyak di Selayar

PENDIDIKAN HARMONI Menyebarkan Perdamaian dari Sekolah ke Sekolah di Sulawesi Tengah

Menenun pelestarian lingkungan dan penguatan perempuan di Sumba, NTT

RUMAH TUNGGU Kehamilan dan kelahiran yang lebih aman di Maluku Tenggara Barat









TERUNGKAP ATAU DIPAHAMI? PARA RAMANAMI

Transparansi bukan berarti melihat 'tembus pandang' sebuah bangunan: transparansi bukan hanya ide fisik, tapi juga intelektual.

Transparency is not the same as looking straight through a building: it's not just a physical idea; it's also an intellectual one.

Helmut Jahn



INFORMASI adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.*)

INFORMASI PUBLIK adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.*)

BADAN PUBLIK adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.*)

OLEH LUNA VIDYA

erminologi di atas menjelaskan komponen penting dan benang merah hak publik atas informasi pengelolaan anggaran daerah, terutama mengenai sektor-sektor strategis yang menyentuh kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Anggaran untuk sektor-sektor ini bermuara pada kualitas layanan publik (barang, jasa dan/atau administratif) yang dihasilkan. Setidaknya demikian utopia hak publik atas informasi pengelolaan anggaran (publik) daerah.

Akses publik kepada informasi menjadi demikian mudah saat ini. Kemudahan itu membesar bersama tuntutan publik atas tranparansi-termasuk atas pengelolaan anggaran publik. Indikator transparansi angaran kemudian adalah jumlah informasi yang dihasilkan oleh sektor terkait. Juga tersedia mekanisme partisipasi publik dalam proses perencanaan anggaran pembangunan, seperti Musrenbang. Meski demikian informasi mengenai hasil dari tahapan-tahapan penting pengelolaan (proses perencanaan anggaran, belanja) keuangan publik, tetaplah menjadi zona remangremang, jika tidak terlarang.

MEDIA MASSA DAN PENGELOLAAN ANGGARAN (PUBLIK) DAERAH

Sifat anggaran publik semestinya 'publik' dan 'jelas. Media selain sebagai "watchdog" atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi, juga memfasilitasi berkembangnya 'sifat alamiah' pengelolaan anggaran sektor publik dengan memberitakan berbagai proses dan dinamika pengelolaan keuangan daerah.

Entah diperhatikan atau tidak, setiap hari media memberi informasi terkait anggaran yang bersumber dari APBD, bermuara pada layanan publik. Mulai dari perencanaan proses politis di legislatif, belanja sektoral pemerintah, penyerapan, dafisit maupun surplus anggaran. Dari kebijakan sampai foto perbaikan jalan tani.

Tapi juga soal korupsi. Inilah dinamika pengelolaan anggaran publik. Berita mengenai pengelolaan keuangan daerah ini, menyebar di berbagai kolom mulai dari ekonomi sampai investigasi, dari isu yang muncul di halaman politik sampai gugatan di surat pembaca. Atau bisa jadi hal ini merupakan topik diskusi dalam siaran radio favorit anda. Memperhatikan lebih cermat, informasi yang diperoleh media, maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang berkepentingan mengenai pengelolaan keuangan publik cenderung 'bocoran', sedikit-jika tidak ada-informasi yang dihasilkan berbentuk dokumen up to date.

Karena sifatnya yang 'bocoran', imbasnya tampak pada produk informasi kemudian. Informasi yang dihasilkan tidak berpihak pada pembelajaran publik. Faktanya, oleh media, berita pengelolaan anggaran publik cenderung dijuduli bombastis, minim informasi yang mengambarkan ada analisis yang telah dikerjakan terkait berita.

Berita-berita kemudian didominasi oleh percik pengungkapan kasus penyelewengan. Berita tentang kasus atau kemungkinan menjadi kasus korupsi, diikuti oleh jumlah berita tentang angka-angka anggaran yang dialokasikan pada berbagai sektor, hanya sedikit informasi yang dihasilkan mengenai hak publik atas alokasi anggaran di sektor strategis: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Manajemen Anggaran Publik, adalah topik yang berkembang seiring makin besar dan tidak terelaknya tuntutan publik terhadap 'transparansi' APBD. Secara paralel transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai. Media berperan penting di dalamnya. Informasi mengenai pengelolaan anggaran publik oleh media maupun pemerintah, atau para pihak lain, dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berkomunikasi, dengan publik. Menjelaskan berbagai informasi yang relevan. Tetapi apakah informasi tersebut memberi ruang kepada publik-bukan hanya kaum melek huruf- untuk mulai mengidentifikasikan dirinya di dalam anggaran publik dengan persoalan- persoalan kesehariannya? Misalnya, dengan anggaran 1 milyar yang diusulkan untuk renovasi Pasar Todopuli, Saparuddin pedagang di pasar itu, akan mendapatkan los yang lebih besar, dengan keringanan harga dan cicilan, sebab los yang ia miliki sebelumnya terbakar. Apakah dengan anggaran 1 milyar tersebut akan ada fasilitas MCK yang lebih manusiawi di pasar tersebut, ada ruang di ruang di mana anak-anak balita yang terpaksa diajak berdagang di pasar, dapat bermain? Apakah ada mekanisme yang dapat digunakan oleh Saparuddin dan teman-teman pedagang lainnya, untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terakomodir di dalam anggaran 1M renovasi pasar itu?

'Transparansi' kemudian, adalah pertanyaan yang perlu dijawab dengan kritis. Apakah media sedang melakukan fungsinya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memonitor pengelolaan anggaran publik, ketika memproduksi berita atas nama transparansi?

INFORMASI LEBIH LANJUT

FOR MORE INFORMATION

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program PEACH, Anda dapat menghubungi **Luna Vidya** melalui email: **lunavidya@bakti.org**

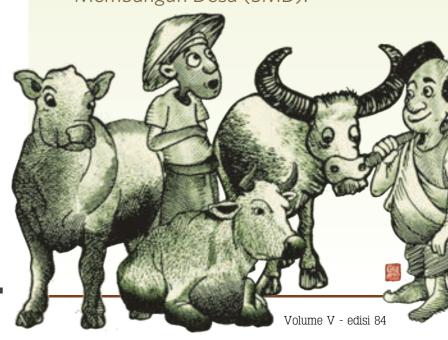
OLEH MAHARANI

asyarakat Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat yang berperadaban beternak, khususnya sapi. Di dalam masyarakat ada istilah yang dikenal ngaret dan ngaro. Ngaret artinya beternak. Setiap masyarakat petani di Nusa Tenggara Barat setidaknya memiliki ternak, baik itu sapi, kerbau, kambing dan paling tidak bebek ataupun ayam. Ngaro artinya bertani. Oleh karenanya ngaret dan ngaro itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa terpisah.

Berbicara potensi, Nusa Tenggara Barat memiliki alam yang sangat cocok untuk melakukan proses ternak baik skala rumah tangga maupun skala perusahaan. Di Nusa Tenggara Barat pemerintah memiliki program unggulan yang dinamakan PIJAR. PIJAR adalah singkatan dari tiga komoditas unggulan yakni sapi, jagung, dan rumput laut. Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan komoditas ini diantaranya adalah memberi bibit pada kelompok tani, meningkatkan fungsi dan peran Pusat kesehatan Hewan dalam menangani penyakit strategis dan penanganan pasca kelahiran, dan mengurangi jumlah sapi betina produktif yang dipotong serta menyelamatkan sapi betina produktif. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan sumber dana perkreditan dengan bunga rendah untuk membantu petani.

Hingga tahun 2011 dana yang bersumber dari APBN yang masuk ke pengembangan komoditas ini sebesar tak kurang dari 78 milyar rupiah. Dana dari APBD Provinsi sebesar 14 milyar rupiah sedangkan perbankan sebesar 50 milyar rupiah.

Sampai saat ini, menurut hasil survei dari statistik jumlah populasi sapi di Nusa Tenggara Barat mencapai 784.019 ekor pada tahun 2011. Dengan jumlah ini, sektor peternakan di provinsi tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 261.340 orang, termasuk di dalamnya 212 orang yang tergabung dalam program Sarjana Membangun Desa (SMD).



Untuk mempercepat dan mempermudah pengontrolan baik secara program dan budidaya, masyarakat peternak diharapkan untuk berkelompok dalam pemeliharaan sapi. Di dalam masarakat dikenal dengan kandang kolektif. Tidak hanya dalam pengadaan sapi saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, proses pembinaan juga terus dilaksanakan. Dengan membuat program yang dinamakan Sarjana Membangun Desa (SMD). Dalam program ini, setiap kelompok tani didampingi oleh satu orang sarjana peternakan. Tugas sarjana peternakan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dalam hal teknis pengelolaan peternakan sampai pada pemasaran.

Dalam diskusi praktik cerdas Forum Kawasan Timur Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat yang dilakukan dengan masyarakat peternak di Desa Lendang Nangka timbul beberapa persoalan dalam hal pemeliharaan. Seorang peternak mengungkapkan bahwa selama ini pelatihan dan penyuluhan hanya pada kelompok tani bukan pada petani. Peternak juga selama ini hanya memelihara tapi tidak ada pelatihan untuk mengatasi penyakit, manajemen kesehatan dan lingkungan peternakan.

Hal-hal tersebut memang kerap menjadi kendala dalam beternak. Kelompok yang didampingi oleh seorang sarjana peternakan melalui program SMD biasanya akan lebih cepat merespon kendala yang ada, namun masih banyak kelompok ternak maupun peternak individu yang masih membutuhkan bimbingan baik dalam hal teknis dan pemasaran.

Sampai saat ini, menurut hasil survei dari statistik jumlah populasi sapi di Nusa Tenggara Barat mencapai 784.019 ekor pada tahun 2011. Dengan jumlah ini, sektor peternakan di provinsi tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 261.340 orang, termasuk di dalamnya 212 orang yang tergabung dalam program Sarjana Membangun Desa (SMD).

Dalam diskusi juga muncul cara pemeliharaan sapi yang cepat dan menguntungkan. Salah satu peternak pernah

pelatihan ke NTT. Di sana kami memperoleh ilmu mengenai pakan kering dan sudah diterapkan di beberapa tempat di sana.

Melihat cara peternak di Kupang saya langsung tertarik. Sapi tidak diberikan pakan setiap waktu, tetapi memberikan jadwal makan. Cara tradisional di sini adalah dengan memberikan loloh yang terbuat dari telur busuk dan lidah bebek. setelah diberikan loloh nafsu makan meningkat. Sapi sering mencret saat memakan rumput basah di musim penghujan. saya juga memberikan pupuk dan garam pada pakan. Terkadang konsentrat. Dengan cara memelihara tersebut saya bisa mendapatkan untung yang banyak. "Dulu saya membeli sapi dengan harga 3 juta dalam 1,5 tahun sapi saya ditawar 7 sampai 8 juta perekor," ujar Peternak yang telah ikut pelatihan.

Untuk pasar, saat ini beberapa perusahaan besar sudah mulai melirik potensi sapi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Rumah Potong Hewan juga sangat mempengaruhi harga sapi. Pemerintah juga membangun sarana pendukung pengembangan komoditas sapi yaitu dengan membentuk lokasi sentra pembibitan di kawasan Village Breeding Centre. Selain itu membangun Rumah Potong Hewan sebanyak dua unit dengan kapasitas 70 ekor/hari dan membangun pabrik pupuk organik sebanyak enam unit dengan kapasitas sebanyak 30 ton/hari.

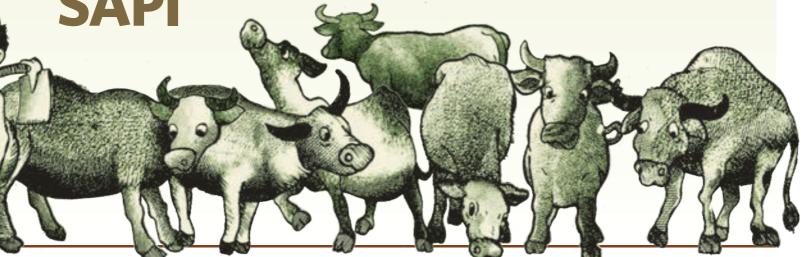
Semoga dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dukungan dari para investor yang terjun dibidang persapian ini akan mampu mangangkat derajat kehidupan petani ternak di Nusa Tenggara Barat ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Koordinator Wilayah Forum KTI Wilayah Nusa Tenggara Barat Institusi : Pusat Pengembangan Sumberdaya Regional dan Pemberdayaan Masyarakat . Email: maha_prof80@yahoo.co.id

MAMPUKAN NTB MENJADI BUMI SEJUTA SAPI

HASIL CATATAN DISKUSI PRAKTIK CERDAS WILAYAH NTB





erikanan karang sangat tergantung pada tiga ekosistem penting di laut meliputi ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Selama ini yang terjadi, masyarakat berpendapat bahwa yang berperan besar dalam perikanan karang hanyalah ekosistem terumbu karang dan sedikit mangrove. Jika ditilik lebih dalam, tiga ekosistem penyangga perikanan karang ini mempunyai peranan yang sama besarnya, sehingga jika salah satu diantaranya mengalami perubahan kondisi maka akan sangat mempengaruhi kondisi perikanan karang secara keseluruhan.

Kebanyakan penelitian yang dilakukan di Wakatobi lebih berfokus pada ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove. Karenanya data awal tentang kondisi lamun yang ada di daerah tersebut masih sangat minim. Hal ini secara tak langsung menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kontribusi lamun bagi perikanan karang. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian tentang lamun menjadi sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan peran penting lamun sebagai sumber penghidupan penting masyarakat Wakatobi.

Forum Kahedupa Toudani (Forkani) bekerjasama dengan Cardiff University dan Swansea University Wales melakukan sebuah program penelitian tentang lamun di Wakatobi yang dinamakan Program Lamun Wakatobi (Wakatobi Sea Grass - Watch). Program ini mempunyai visi untuk mendidik dan membangun kapasitas pengambil kebijakan lokal untuk memonitor kondisi dan mendukung tindakan konservasi yang menjamin pemulihan ekosistem lamun yang berjangka panjang.

Lamun adalah salah satu indikator kehidupan yang menunjukkan kesehatan lingkungan. Padang lamun mempunyai peranan ekologi yang penting. Keberadaan lamun di suatu tempat menunjukan keterukuran dan respon yang tepat pada keadaan lingkungan sekaligus menyatukan kondisi lingkungan. Program ini penting untuk dilakukan di Wakatobi untuk menilai keadaan dan kecenderungan pada kualitas lingkungan, mengelompokkan permasalahan yang muncul,

merespon krisis lingkungan, mendesain program pengelolaan lingkungan dan mengevaluasi tingkat keberhasilan dan pemenuhan kebijakan berkaitan dengan kondisi perikanan Wakatobi saat ini.

Program Lamun Wakatobi bertujuan untuk pendidikan, kesadaran dan kapasitas pembangunan, membangun partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat, menjadi standar metodologi penelitian tentang lamun, membangun kerjasama antara pemerintah, NGO dengan stakeholder dalam melakukan monitoring lamun berjangka panjang serta sebagai peringatan dini terhadap menurunnya ekologi .

Program yang dimulai sejak Okober 2012 ini akan dilaksanakan hingga satu tahun ke depan. Kegiatannya meliputi survey rumah tangga yang mengambil sampel dari setiap desa di Wakatobi, survey pasar di Pulau Kaledupa, gleaning survey di Pulau Kaledupa, monitoring perikanan di Sembilan desa di Pulau Kaledupa, survey transek lamun, dan program edukasi yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah lanjutan yang ada di Wakatobi.

Program lamun Wakatobi dimulai dengan lokakarya sehari yang membicarakan bagaimana cara memonitor lamun di Pulau Hoga pada tanggal 13 Agustus 2012. Lokakarya ini melibatkan perwakilan forum nelayan dari Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa,Tomia, dan Binongko. Lokakarya ini juga dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW),TNC-WWF Joint Program Wakatobi, Jaringan Guru Biru (JGB) Wakatobi. Program yang disusun sebagai program kolaboratif ini akan melibatkan kelompok komunitas, kelompok sekolah, LSM serta akademisi, Lembaga Penelitian dan Pemerintah.

Monitoring lamun ini hasilnya akan sangat bermanfaat ketika mampu menghasilkan kebijakan pengelolaan yang efektif yang mampu melindungi atau merehabilitasi lingkungan laut sesuai dengan yang diharapkan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Anggota Forkani (Forum Kahedupa Toudani) dan dapat dihubungi melalui email **forkani@yahoo.co.id**

OLEH AYU PUTU EKA NOVITA

iaya Persalinan yang tinggi dan tingginya angka kematian Ibu dan balita adalah latar belakang lahirnya Gerakan Seribu Rupiah yang dikenal dengan GESER. Gerakan ini membantu ibu, bayi dan balita yang dirujuk ke Rumah Sakit sehingga biaya yang timbul dapat ditanggung bersama dengan anggota Posyandu lainnya.

Berbagai diskusi di daerah tersebut menyimpulkan bahwa mahalnya biaya persalinan di Rumah Sakit, sulitnya mengakses Jaminan Persalinan dan layanan kesehatan bagi Ibu dan Anak, maka dilakukan diskusi kembali bagaimana menghadapi masalah yang sering timbul disekitar mereka sehingga membuat tingginya angka kematian Ibu dan balita di Maumere, Kabupaten Sikka, Flores.

Gerakan Seribu Rupiah adalah gerakan kepedulian yang dilakukan oleh komunitas Ibu untuk memberdayakan diri dan lingkungannya tentang pentingnya Hidup Sehat dan peduli pada Ibu Hamil dan Ibu yang memiliki balita juga tumbuh kembang balita. Pada awalnya dimulai di komunitas Wuring Lembah hingga sekarang diimplementasikan diseluruh lokasi FSP-SOS Children's Village Flores.

Adalah Ibu Maria Kristina Da Guer yang menjadi inisiator dari gerakan ini. Ibu yang kerap disapa Ibu Rista ini telah berkerja selama lebih dari empatbelas tahun pada sebuah lembaga bernama SOS Children's Village Flores. Ibu Rista bertugas sebagai staff Family Strengthening Programme yang mengkoordinasi wilayah Kabupaten Sikka. Family Strengthening

Programme adalah program yang dilaksanakan oleh SOS Children's Villages Indonesia dengan tujuan pemenuhan hak-hak anak melalui pemberdayaan keluarga. Selama bekerja dalam program ini, Ibu Rista melihat bagaimana pemenuhan layanan kesehatan di Komunitas sekitar SOS Children's Village Flores tergolong masih sangat rendah.

Ide memulai Gerakan Seribu Rupiah pun lahir. Ibu Rista ingin menumbuhkan kepedulian masyarakat akan pentingnya kebersamaan dalam membantu sesama ibu yang akan melahirkan, khususnya ibu-ibu yang menjadi anggota Posyandu. Bantuan ini dikhususkan untuk meringankan biaya persalinan yang sering kali tak terjangkau oleh kebanyakan keluarga di tempatnya bertugas. Ini termasuk biaya untuk layanan kesehatan bagi anggota yang dirujuk untuk melahirkan di Rumah Sakit dan biaya transportasi.

Gerakan Seribu Rupiah dilakukan dengan tujuan membantu Ibu dan Balita mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit bila mereka dirujuk untuk berobat di Rumah Sakit. Gerakan ini juga membantu Ibu yang kesulitan biaya persalinan. Biaya persalinan yang tinggi di Rumah Sakit bagi kehamilan yang beresiko, akan sangat membebani keluarga sehingga dengan adanya gerakan ini diharapkan keadaan ini dapat ditanggulangi bersama.

Gerakan Seribu Rupiah juga membantu biaya transportasi ke Rumah Sakit. Maumere memiliki Rumah Sakit yang jaraknya satu jam

perjalanan dari lokasi tempat mereka tinggal, sehingga membutuhkan waktu untuk membawa Ibu yang dirujuk ke Rumah Sakit, dan karena sulitnya sarana transportasi maka harus menyewa mobil khusus untuk membawa Ibu atau Balita yang dirujuk ke Rumah Sakit, tentunya hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka dengan adanya gerakan ini diharapkan dapat membantu anggota yang mengalaminya.

Gerakan Seribu Rupiah ini diharapkan memberikan dampak pada semakin banyaknya kehamilan beresiko yang dirujuk ke Rumah Sakit di lokasi dampingan FSP-SOS Children's Village Flores, 100 persen dapat tertangani tahun 2009-2011, berkurangnya jumlah ibu hamil dengan anemia, dan berkurangnya

jumlah anak yang lahir dengan kategori tidak sehat.

Gerakan Seribu UNTUK MENGGESER KEGALAUAN MELAHIRKAN



- Kabupaten Sikka yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah satu dari sepuluh Kota dan Kabupaten dengan prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang pada balita tertinggi menurut laporan Riskesdas 2007. Nusa Tenggara Timur sendiri juga masih termasuk dalam sepuluh provinsi dengan prevalensi nasional kurang energi kronis pada wanita usia subur. Masuk ke dalam dua kategori tersebut dapat menggambarkan kondisi kesehatan yang kurang baik di sana.
- Data tahun 2007 tentang profil kesehatan Nusa Tenggara Timur memaparkan adanya kunjungan ibu hamil K1 berjumlah 7.828 dari 8.229 jumlah ibu hamil yang terdaftar, dan sebanyak 70 persen kunjungannya adalah ke Puskesmas artinya ada 401 lbu hamil yang tidak menerima layanan di fasilitas kesehatan dan hanya 30 persen dari Jumlah Ibu Hamil yang dapat mengakses Rumah Sakit. Daerah dan swasta. Dari 401 anak yang lahir dari Ibu tersebut berarti tidak terakses pelayanan kesehatan sehingga beresiko lahir dengan tidak sehat.
- Puskesmas adalah layanan kesehatan bagi masyarakat terdekat dan hanya dapat diakses oleh tidak lebih dari 70 persen dari 7.828 atau 5.476 yang dapat mengakses Puskesmas sehingga dibutuhkan layanan kesehatan lainnya yang dapat diakses oleh 401 ibu hamil agar anak lahir sehat.
- Posyandu adalah tempat layanan kesehatan Ibu dan anak yang dilakukan oleh masyarakat desa atau kelurahan. Posyandu menjadi pilihan yang dapat memberikan layanan kesehatan bagi Ibu dan anak. Posyandu merupakan pemberdayaan masyarakat bagi dan oleh masyarakat, di tempat inilah dapat diberikan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh Ibu dan anak.
- Melalui Posyandu dimana layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita dilakukan sebulan sekali maka dibentuklah kelompok ibu hamil, dan kelompok ibu yang memiliki balita. Kelompok ibu akan berkumpul dan berdiskusi mengenai permasalahan yang mereka hadapi setiap bulannya di dampingi oleh fasilitator dari FSP-SOS Children's Village Flores. Kelompok ibu yang dibentuk di Posyandu beranggotakan ibu yang memiliki balita, ibu yang sedang hamil, dan ibu pemerhati kesehatan
- Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berada di lokasi dimana program penguatan keluarga dijalankan dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun hingga kelompok masyarakat tersebut mandiri dan FSP dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis bekerja pada Department of Research, SOS Children's Villages Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: eka.ayu@sos.or.id

UNICEF INDONESIA

RINGKASAN KAJIAN OKTOBER 2012

JALAN KE DEPAN BAGI INDONESIA

MDG, KEADILAN DAN ANAK-ANAK

ujuan Pembangunan Milenium (MDG) berusaha mengangkat prospek kehidupan dan kesejahteraan perempuan dan anakanak yang saat ini sedang meningkat dengan signifikan, khususnya melalui peningkatan harapan hidup, penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, gizi dan akses terhadap pendidikan. Untuk anak-anak, MDG memberikan sebuah kerangka bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak dapat terpenuhi. Akan tetapi, untuk menghasilkan dampak yang diharapkan ini, keadilan harus dipahami oleh seluruh penduduk. Kecenderungan data global menyatakan bahwa meskipun telah ada kemajuan umum, tetapi sebagian besar penduduk masih tertinggal, sehingga mengakibatkan meluasnya kesenjangan sosialekonomi, dan semakin banyak nya orang yang kurang beruntung. Jika situasi ini tidak dapat diperbaiki, pencapaian MDG tidak dapat berkesinam-bungan. Oleh karena itu, masalah keadilan menjadi sangat penting bagi pencapaian MDG secara berkesinambungan.



Meskipun telah mengalami krisis yang berlapis selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif selama dekade terakhir, dimana penur unan kemiskinan telah mengalami kemajuan

penting terhadap pencapaian MDG. Menurut laporan pemerintah terakhir, empat dari 35 indikator yang paling langsung berhubungan dengan kesejahteraan perempuan dan anak-anak telah tercapai, 20 indikator berada pada arah yang tepat untuk mencapainya, dan 11 indikator perlu mendapatkan perhatian khusus atau tidak mungkin tercapai pada tahun 2015. Akan tetapi, keseluruhan kemajuan terhadap pemenuhan target MDG jauh dari universal. Ringkasan ini mengkaji kesenjangan yang luas di samping keberhasilan yang telah dicapai oleh Indonesia, dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang tertinggal dan bidang-bidang utama yang menjadi perhatian.

MENCAPAI MDG DENGAN KEADILAN :

TANTANGAN SAAT INI

I. KESENJANGAN ANTAR PROVINSI

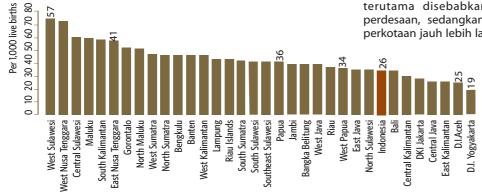
Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan 497 kabupaten. Analisa Situasi Anak di Indonesia (SITAN) tahun 2010 menunjukkan pola yang konsisten dalam hal kesenjangan antar provinsi, dimana sebagian besar provinsi tertinggal dibanding rata-rata nasional dan sejumlah kecil provinsi telah melebihi rata-rata nasional (lihat Tabel 2).

Misalnya, Indonesia berada pada arah yang tepat untuk mencapai MDG 4.1 yang berkaitan dengan Angka Kematian Bayi, dimana terdapat 34 kelahiran hidup per 1.000 kelahiran, tetapi ada 27 dari 33 provinsi memiliki angka kematian yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.^{ji}

Kesenjangan antar provinsi juga tinggi: Sulawesi Barat, provinsi termiskin memiliki AKB sebesar 74 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan 34 per 1.000 untuk rata-rata nasional dan 19 per 1.000 di DI Yogyakarta.

Berdasarkan tabel 1, kecuali pendidikan, terdapat bukti tentang kesenjangan provinsi untuk sebagian besar indikator MDG yang secara langsung terkait dengan hak-hak anak (MDG 1 sampai 4), dan hal yang sama dapat dilihat pada indikator cakupan pelayanan. Provinsi-provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (khususnya Papua, NTT dan NTB), provinsi yang baru dibentuk seperti Sulawesi Barat, Gorontalo dan Jambi, serta provinsi-provinsi yang terkena dampak konflik yaitu Maluku, Papua dan Sulawesi Tengah, adalah di antara provinsi-provinsi miskin dalam hal indikator kemiskinan, kesehatan, pendidikan

GAMBAR1: Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Provinsi, Indonesia 2007



dan gizi. Kesenjangan antar provinsi juga umum dengan perbedaan yang jelas antara kabupaten dalam provinsi yang sama.

TABEL 1. Kesenjangan Provinsi Dengan Indikator Kunci MDG & Pembangunan Manusia

Indikator	Jumlah Rata-rata provinsi di nasional bawah rata- rata nasional		Provinsi/angka akhir skala	
Angka kematian Balita	44/1,000	26	Sulawesi Barat D.I Yogyakarta	96/1,000 22/1,000
	14.50%	16	Papua D.K.I Jakarta	37.53% 3.62%
% Perempuan yang mendapatkan satu/lebih kunjungan pelayanan antenatal terampil	N/A	20	Papua D.K.I Jakarta	69% 99.50%
% Kelahiran yang ditolong oleh penyedia terampil	73%	20	Maluku D.K.I Jakarta	32.80% 97.30%
% Pelayanan nifas pascapersalinan	84%	21	Papua D.I Yogyakarta	34% 98%
% Anak balita berat badan kurang *	Parah: 5.4% Sedang: 13%	19	NTT Parah D.I Yogyakarta Parah NTT Sedang D.I Yogyakarta Sedang	9.40% 2.40% 24.20% 8.50%
% Anak balita bertubuh pendek (stunted)	Parah: 18.8% Sedang: 18%	28	NTT Parah NTT Sedang Riau Parah Riau Sedang	24.20% 22.50% 13.40% 12.70%
% Anak balita bertubuh kurus (wasted)*	Parah: 6.2% Sedang: 7.2%	25	Riau Parah Riau Sedang D.I Yogyakarta Parah D.I Yogyakarta Sedang	12.20% 9.90% 2.40% 5.20%
% Bayi berat lahir rendah *	11.50%	15	Papua Bali	27% 5.80%
% Perempuan hamil yang menerima tablet besi (>90)	29.20%	22	West Sulawesi D.I Yogyakarta	3% 75.20%
% Rumah tangga dengan akses berkesinambungan ke air bersih	55.10%	24	West Kalimantan D.K.I Jakarta	19.40% 87.80%
% Rumah tangga dengan akses berkesinambungan ke sanitasi yang memadai	49.50%	20	NTT D.K.I Jakarta	17.90% 78.10%

II. KESENJANGAN DESA-KOTA

Indonesia mengalami urbanisasi yang cepat dengan 48% penduduk dan 54% anak-anak tinggal di daerah perkotaan. Kemiskinan tetap terkonsentrasi di daerah-daerah perdesaan dan merupakan salah satu faktor berpengaruh yang berkontribusi terhadap kesenjangan desa-kota di Indonesia. Faktor-faktor lain yang meliputi isolasi geografis, infrastr uktur yang buruk, biaya transportasi yang tinggi, kualitas pelayanan yang buruk dan kapasitas sumber daya manusia yang rendah ditemukan di daerah-daerah perdesaan.

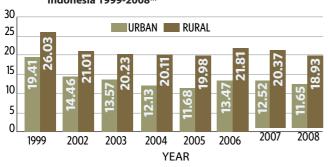
Di tingkat nasional, telah terjadi beberapa penghapusan kesenjangan antara penduduk kota dan desa, sebagaimana dibuktikan dengan penurunan kematian bayi (Gambar 3). Pada saat yang sama, perlu diperhatikan bahwa kecenderungan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembangunan perdesaan, sedangkan tingkat kemajuan di daerah-daerah perkotaan jauh lebih lambat. Tren yang sama juga terjadi pada

kematian bayi lahir dan kematian anak balita, dengan angka penurunan yang lebih besar di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan. Perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan daerah-daerah kumuh menimbulkan tekanan signifikan terhadap pelayanan kesehatan dan sektor sosial lainnya dan infrastruktur.

III. KESENJANGAN KEKAYAAN

Berbeda sekali dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya di Amerika Latin dan Afrika, Indonesia tidak berhubungan dengan tingginya tingkat kesenjangan kekayaan dan pendapatan. Akan tetapi, kecenderungan ini sedang mengalami perubahan. Koefisien Gini Indonesia masih relatif rendah, tetapi telah mengalami peningkatan secara tetap, dari 0,334 pada tahun 1993 menjadi 0,364 pada tahun 2007.

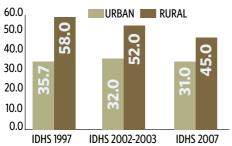
GAMBAR 2 Prosentase Penduduk Miskin (berdasarkan indeks hitungan kepala) Menurut Daerah, Indonesia 1999-2008^{||||}



Kesenjangan pendapatan tercermin dalam indikator angka kematian anak dan ibu, yang sampai tingkat tertentu dapat dijelaskan dengan kesenjangan cakupan p elayanan kesehatan antara kelompok miskin dan kaya. Studi Kasus Investasivi menyatakan kesenjangan cakupan minimal seb esar 20% antara kelompok terkaya dan termiskin untuk hampir semua pelayanan kesehatan esensial ibu dan anak.

Data Survei Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas 20 07) menunjukkan bahwa dukun bayi tetap menjadi sumber utama bantuan bagi perempuan hamil untuk tiga terbawah. Berdasarkan Survei Antarsensus (SUPAS), Gambar 4 menunjukkan bahwa 83 persen perempuan dalam kuintil teratas melahirkan di fasilitas kesehatan, tetapi hanya 14 persen perempuan dalam kuintil terendah melakukan hal yang sama. Temuan-temuan ini tampaknya relevan untuk menjelaskan, minimal sebagian, satu-satunya penurunan marjinal angka kematian bayi dan ibu di Indonesia selama dekade terakhir.

GAMBAR3 Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Daerah, Indonesia 1997-2007ⁱ

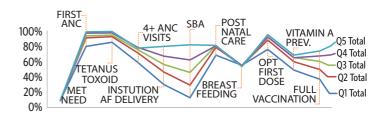


Tren yang sama juga terjadi pada indikator yang berhubungan dengan pendidikan anak. Indonesia telah mencapai pendidikan dasar universal (MDG 2) dan pada dasarnya menghapus kesenjangan akses ke pendidikan dasar antara penduduk termiskin dan terkaya. Akan tetapi, kesenjangan tersebut melebar karena transisi anak ke sekolah menengah. Partisipasi di sekolah menengah pertama sebagian besar adalah penduduk kaya. Di antara kelompok usia 13 sampai 15 tahun, kemungkinan anak-anak dari rumah tangga termiskin untuk tidak bersekolah adalah empat kali lebih besar dibandingkan dengan anak-anak dari rumah tangga terkaya.

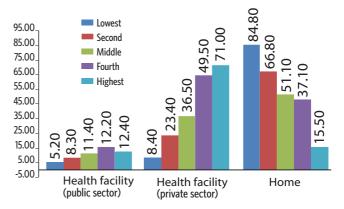
IV. KEMISKINAN UMUM PADA ANAK-ANAK

Indonesia telah mencapai tujuan MDG yang pertama untuk menurunkan kemiskinan ekstrim pada tahun 2015. Kemiskinan ekstrim mengalami penurunan dari 20,6% penduduk Indonesia yang hidup dengan kurang dari \$1 PPP / hari pada tahun 1990 menjadi 5,9% pada tahun 2008 (BAPPENAS 2010:17)^{jx}.dan angka kemiskinan tersebut (sesuai garis kemiskinan nasional sebesar \$1,4 PPP / hari) telah menurun secara tetap selama beberapa

GAMBAR4 Cakupan intervensi-perbedaan untuk seluruh kelompok (SDKI 2007)

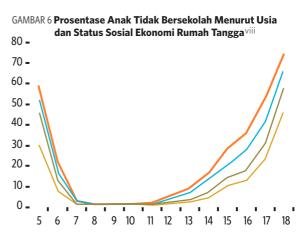


GAMBAR 5 Prosentase Kelahiran Menurut Tempat Persalinan dan Menurut Kelompok Kekayaaan Indonesia 2007^{vii}



tahun sampai angka historis sebesar 13.30% pada tahun 2010^x. (BAPPENAS 2010:17). Keberhasilan Indonesia ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan serangkaian intervensi perlindungan sosial termasuk asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bantuan sosial dan program penur unan kemiskinan berbasis masyarakat.

Akan tetapi, jumlah anak-anak yang masih terkena dampak kemiskinan sangat tinggi. Riset yang dilakukan oleh lembaga riset Indonesia SMERU menunjukkan bahwa pada tahun 2009 sekitar 44,3 juta anak Indonesia hidup dengan kurang dari \$2 PPP per hari, dari jumlah tersebut 13,8 juta hidup dibawah garis kemiskinan nasional (kira-kira \$1,4 PPP per hari) dan 8,4 juta anak hidup dalam kemiskinan ekstrim (kurang dari \$1 PPP per hari).



Selain itu, angka penurunan kemiskinan pada anakanak tertinggal di belakang angka penurunan kemiskinan penduduk umum.

Anak-anak sebagai sebuah kelompok mengalami kemiskinan secara tidak seimbang jika dibandingkan dengan penduduk lainnya, dan situasi ini diperburuk oleh ketidakadilan yang ada. Riset yang dilakukan oleh SMERU tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi ditemukan di provinsi-provinsi kawasan timur dengan lebih dari 20% anak yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrim di enam provinsi: NTT (36,21%), Gorontalo (32,2%), Sulawesi Tenggara (24,17%), Sulawesi Selatan (23,67%), Sulawesi Barat (21,19%), dan NTB (20.77%)x iii. Akan tetapi, jumlah tertinggi anak miskin terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang mencapai 48% dari 8,4 juta anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrim (hidup di bawah \$1 PPP/ hari).

Jumlah penduduk^{xi} yang hidup dengan kurang dari \$1 PPP/ kapita/hari

Proporsi anak^{xi} yang hidup dengan kurang dari \$1 PPP/ kapita/hari

8.55%

10.63%

Jumlah penduduk di yang hidup dengan kurang dari \$2 PPP/ kapita/hari Proporsi anak^{xi} yang hidup dengan kurang dari \$2 PPP/ kapita/hari

50.65%

55.78%

Pengentasan kemiskinan telah menjadi pusat perencanaan pembangunan nasional Indonesia selama dekade terakhir dan beberapa langkah telah dilakukan untuk melindungi anak-anak, terutama dalam hal pendidikan dasar dan kesehatan, melalui program jaring pengaman sosial, bantuan tunai bersyarat dan bantuan lainnya. Akan tetapi, bukti yang ada tentang kemiskinan anak di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak tidak memperoleh manfaat yang sama dari pengentasan kemiskinan.

- Ada 8 kategori MDG yang luas, yang menggabungkan lebih dari 70 sub-target terkait. SITAN 2010 hanya mempertimbangkan target-target MDG yang paling atau langsung berhubungan dengan kesejahteraan perempuan dan anak-anak seperti kesehatan, kematian, gizi, kemiskinan, pendidikan dan air bersih dan sanitasi. Misalnya, MDG 8 tentang pengembangan kemitraan global tidak dimasukkan dalam analisa tersebut.
- Sumber: SDKI 2007. Catatan: Angka-angka yang disajikan di sini untuk periode sepuluh tahun sebelum survei
- Sumber: Indikator kesejahteraan, diproses oleh BPS Badan Statistik Indonesia, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 1999-2008
- IV Sumber: IDHS 1997, 2002-2003 and 2007
- V SITAN 2010 berdasarkan BPS-Badan Statistik Indonesia, Indikator Kesejahteraan; Indikator Pendapatan dan Konsumsi, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 and 2007
- VI UNICEF-Menkes 'Studi Kasus Investasi di Indonesia, 2012
- vii Sumber: SDKI 20078
- Viii Sumber: Survei anak-anak yang tidak bersekolah, Kementerian Pendidikan Nasional, BPS dan UNICEF (analisa data Susenas 2009)
- ix Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (2010), Laporan tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, Jakarta, http://, terakhir diakses tanggal 15 November 2011.
- Garis kemiskinan nasional adalah nilai rupiah yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari untuk pangan sebesar 2,100 kilo kalori (kkal), ditambah kebutuhan minimal non-pangan, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Garis kemiskinan nasional dihitung sebesar Rp 211,726 pada tahun 2010 oleh Biro Pusat Statistic (BPS),ek=23¬ab=4 terakhir diakses tanggal 16 November 2011. SMERU (forthcoming), Child Poverty and Disparity Report, SMERU:Jakarta

Sumber: SMERU 2011 xii Sumber: SMERU 2011 xiii ibid

REKOMENDASI

Di Indonesia, dengan pengecualian pendidikan, kesenjangan antar provinsi, kesenjangan desa-kota dan kesenjangan kekayaan sangat nyata terhadap semua MDG. Di Indonesia, MDG tersebut telah menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Pemerintah Indonesia dan Rencana Strategis (Renstra) sektoral terkait. Langkah-langkah keadilan menjadi lebih nyata. Ada beberapa dilema kunci dan kontradiksi yang terkait untuk mengatasi kesenjangan di Indonesia. Bukti menunjukkan bahwa anak-anak di KawasanTimur Indonesia mengalami ketidakberuntungan secara proporsional jika dibandingkan dengan anakanak dari Kawasan Barat Indonesia. Akan tetapi, konsentrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah tertinggi anak-anak miskin dan rentan terdapat di Jawa.

Kedua kelompok anak rentan harus menjadi target tetapi melalui pendekatan dan formula yang berbeda.

Beberapa rekomendasi yang dapat meningkatkan kemajuan pencapaian MDG dengan keadilan bagi anakanak di Indonesia dijelaskan di bawah ini.

- Pemerintah pusat harus meningkatkan kapasitas untuk memantau hak-hak anak dan dimensi keadilan MDG. Peningkatan ini memerlukan pemilahan indikatorindikator kunci secara sistematis yang terkait minimal dengan dimensi-dimensi ini: provinsi/kabupaten/ kecamatan/desa, perdesaan/perkotaan, pengeluaran rumah tangga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, usia dan jenis kelamin.
- 2. Di daerah-daerah yang berkinerja tinggi, pemerintah pusat dan daerah harus mengkaji kesenjangan antarkabupaten dan kelompok, mengidentifikasi kantong rumah tangga dan anak-anak rentan dan mengembangkan kebijakan, program dan sumber daya dengan sasaran yang tepat.
- 3. Di daerah-daerah yang berkinerja buruk, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan program-program universal yang lebih luas yang digabungkan dengan beberapa pendekatan. Bentuk dan distribusi umum kesenjangan menunjukkan bahwa kesenjangan antarkabupaten dan antarkelompok masih dapat terjadi dalam provinsi-provinsi yang kurang ber untung.
- 4. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah harus meningkatkan upaya-upaya perlindungan sosial untuk mengatasi kerentanan masyarakat miskin, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin, yang disertai dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan permintaan mereka akan pelayanan.
- 5. Pemerintah pusat dan daerah harus menetapkan langkah-langkah untuk merespon urbanisasi yang cepat, dengan memastikan infrastruktur dan pelayanan yang memadai untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial di daerah-daerah perkotaan.
- 6. Pemerintah dengan dukungan dari akademisi dan LSM yang terfokus pada anak harus mengkaji faktor-faktor eksklusi sosial lainnya yang berkontribusi terhadap kerentanan tetapi belum mendapat perhatian yang memadai, termasuk:
 - Disabilitas
 - Kondisi hidup (anak-anak yang hidup dengan dan tanpa asuhan orang tua)
 - Agama dan etnis

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi

jakarta@unicef.org atau klik www.unicef.or.id

PROFIL LSM

BESIPA'E

Buka Akses Informasi untuk Kesejahteraan NTT

ntuk maju, setiap orang perlu informasi. Menggunakan informasi tentang dirinya, lingkungannya, faktor-faktor pendukung, dan tantangan akan membantu setiap orang untuk menyiapkan diri serta mengambil keputusan-keputusan yang diperlukannya untuk menjadi lebih baik.

Demikian pula sebagai sebuah komunitas bahkan masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Akses terhadap informasi sangat menentukan sebuah daerah untuk menentukan arah pembangunan dan mengefektifkan upaya pembangunan yang sedang dijalankan.

Sayangnya tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang merata terhadap informasi. Di banyak tempat, akses terhadap informasi adalah hal yang langka dan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dalam konteks pembangunan, minimnya akses terhadap informasi tidak hanya memperlambat langkah menuju kesejahteraan, tetapi juga menjadi celah untuk tidak transparan dan selanjutnya membuka ruang untuk korunsi

Besipa'e adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus untuk membantu masyarakat dalam hal penyediaan layanan mata pencaharian di Nusa Tenggara Timur.

Lembaga ini bekerja untuk pengentasan kemiskinan dengan membuka akses terhadap informasi, sumberdaya, dan teknologi informasi yang diperlukan masyarakat.

Misi & Visi Besipa'e

Besipa'e didirikan pada 19 Desember 2011. Visi lembaga ini adalah berkelanjutannya penghidupan di Nusa Tenggara Timur. Misi Besipa'e ini adalah mendukung pengentasan kemiskinan di seluruh masyarakat NTT dengan menyediakan peluang dan akses terhadap sumberdaya, pengetahuan, informasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendorong kegiatan berkelanjutan di masa depan tanpa memandang suku, agama, pandangan politik dan budaya, dan diskriminasi gender.

Misi Besipae tersebut sejalan dengan tujuannya, yakni untuk mengembangkan organisasi yang berklanjutan dan sumberdaya pembangunan; dan untuk mempromosikan mata pencaharian yang berkelanjutan dan inklusi sosial dari kelompok rentan

Besipa'e menggabungkan pengalaman internasional dan lokal untuk melayani komunitas. Selain berpengalaman di Indonesia, para staf Besipa'e juga memiliki pengalaman internasional yang bila diterapkan mengacu pada prosdur dan standar internasional akan memperkaya kualitas layanan yang disediakan bagi komunitas.

Kombinasi pengalaman ini ditambah dengan aplikasi metodologi implementasi yang inovatif, memungkinkan Besipa'e untuk mengembangkan area kerjanya di seluruh wilayah NTT dengan cakupan kegiatan antara lain mata pencaharian, energi/lingkungan, kesiagaan dini, bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan, dan penguatan komunitas serta pemberdayaan masyarakat.

Pertukaran Pengetahuan Petani Rumput Laut

Saat ini Besipa'e berfokus pada beberapa kegiatan utama terkait pengembangan budidaya rumput laut di Teluk Kupang. Dalam kegiatan ini, petani menerima panduan dan informasi budidaya melalui SMS. Saat ini sebanyak 200 petani rumput laut telah menggunakan layanan ini dan menerima tambahan



pengetahuan untuk meningkatkan hasil panen dan memperluas jangkauan pemasaran.

Petani rumput laut yang menerima layanan informasi dari Besipa'e juga menerima informasi prakiraan cuaca melalui telepon genggam mereka, lengkap dengan informasi posisi koordinat GPS, termasuk informasi kemungkinan terjadi cuaca ekstrim dan kemudian. Ini sangat penting bagi petani rumput laut yang sangat bergantung pada kondisi pasang surut dan curah hujan, untuk menjaga kualitas budidaya rumput laut mereka.

Informasi harga pasar komoditas rumput laut wilayah Timor Barat juga diberikan secara teratur kepada para petani via SMS. Dengan demikian para petani dapat mengetahui kapan harga rumput laut sedang turun dan kemudian bisa bernegosiasi dengan lebih baik.

Diseminasi Informasi Rencana Pembangunan

Selain bekerja bersama petani rumput laut, Besipa'e juga sedang bekerja sama dengan Tanaoba Lais Manekat (TLM), sebuah lembaga micro-finance di Kupang. Bersama lembaga ini, Besipa'e mendistribusikan SMS dua arah lebih ke pada 1000 penerima di Kabupaten Kupang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan informasi praktik terbaik tentang Kesehatan, Pendidikan, Penyadaran Gender, Pengetahuan Keuangan, dan lainnya.

Kegiatan ini menargetkan penyebaran informasi tentang Rencana Pemangunan Jangka Menengah di sepuluh desa di Timor Tengah Selatan (TTS) di Timor Barat. Informasi ini dikirim kepada warga desa dua kali seminggu via SMS melalui kerja sama dengan Studia Driya Media (SDM).

Umumnya, sulit untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan desa semacam ini. Apalagi dokumen perencanaan pembangunan biasanya hanya dicetak dalam bentuk buku dan tidak disebarkan untuk umum. Kegiatan ini berupaya memaksimalkan layanan teknologi mobile bagi masyarakat pengguna telepon genggam.

Tahap berikut dari program ini akan memaksimalkan penggunaan media sosial dan menciptakan laman desa tertentu di Facebook. Warga desa dilatih untuk menggunakan fitur WAP di telepon genggam mereka sehingga dapat melihat peta, diagram dan grafik yang ada di RPJM serta info lainnya yang tidak dapat didistribusikan lewat SMS.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

LSM Besipa'e

JI. Gang Kolley KM 9, RT 019, RW 007
Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima
Kupang – NTT Indonesia
Tel +62 380 881012
HP 082146240940
Email admin@besipae.org
Facebook https://www.facebook.com/besipae
Twitter @besipae

KEGIATAN DI BaKTI

Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Makassarpreneur menggelar diskusi bertema "Strategic Management in Business", bertempat di BaKTI Makassar.Hadir sebagai narasumber Direktur SEM Institute Jakarta, Ir. Karebet Widjayakusuma, MA yang memaparkan mengenai model manajemen strategis meliputi analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi dan pengendalian strategi.

Selain itu, dipaparkan 10 hal yang menjadi trend dan tuntutan bisnis di masa depan meliputi cepat dan responsif, inovasi kreatif, fokus pada lingkungan yang kompetitif, kepemimpinan pada setiap level, kendali pada visi dan nilai, andil informasi, proaktif, berjiwa mandiri, kreasi pasar masa depan, kemitraan dan peduli lingkungan. Sebanyak kurang lebih 60 orang hadir dalam acara ini.





Yayasan BaKTI kembali mengadakan Diskusi "Inspirasi BaKTI" yang kali ini mengangkat isu peranan perempuan parlemen dalam pemberdayaan masyarakat dengan tema "Suaramu Menentukan Nasibmu!" yang bertempat diruang pertemuan BaKTI Makassar. Ibu Asia Pananrangi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone hadir sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan inspiratif yang dilakukan perempuan dalam membawa perubahan di masyarakat dan juga untuk membuka ruang dialog antar pelaku pembangunan khususnya perempuan dan peserta lain untuk saling berbagi pengalaman dan membangun sinergi dalam kegiatannya. 35 peserta hadir dalam acara ini berasal dari pemerintah daerah, legislatif, LSM, akademisi dan masyarakat umum.



Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Tamalate, Makassar melaksanakan pelatihan pembelajaran tematik bagi guru-guru SD kelas 2 dan 3, bertempat di ruang pertemuan BaKTI. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru-guru dalam merancang rencana pembelajaran, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan untuk menambah wawasan guru dalam mengajar siswa.Sebanyak 51 guru SD mengikuti pelatihan ini.

INFO BUKU



Jurnal Perempuan: Perempuan Pejabat Publik

Penerbit Publisher Deskripsi fisik **Jurnal Perempuan** 142 hal, 15 x 23 cm 1410-153x

Ruang lingkup pelayanan publik cukup luas, meliputi pelayanan barang publik, jasa publik dan administrasi publik yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam buku ini akan dipaparkan secara detail namun dengan bahasa yang sederhana mengenai apa itu pelayanan publik, siapa yang mengatur jalannya pelayanan publik, jaminan undang-undang, siapa yang menyelenggarakan dan informasi detail lainnya seputar pelayanan publik dan tatacara bagaimana memastikan bahwa pelayanan publik dirasakan oleh warga Negara Indonesia.



Inovasi Negeri

Penulis Penerbit Apriani Landa, Ina Rahlina,

Muhary Wahyu Nurba dan Suriani Mapong

Deskripsi fisik PNPM Mandiri x + 233 Hal, 21 cm



Tigapuluh kisah tergabung dalam satu buku yang memuat berbagai inovasi yang dilakukan berbagai individu maupun kelompok masyarakat dalam memajukan daerah serta meningkatkan taraf hidup diri dan orang di sekitarnya. Ketigapuluh tulisan inspiratif ini adalah pemenang kompetisi bercerita PNPM Mandiri 2012/2013 yang dituturkan sendiri oleh masyarakat.



Kita: Panduan Kita Melawan Korupsi

Deskripsi fisik

Transparency International xii + 65 Halaman, 14 x 21 cm

Indonesia

Buku ini berisi cara jitu melawan korupsi ala anak muda dengan fokus pada cara-cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan gerakan anti korupsi di lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat seperti sekolah, rumah,geng nongkrong dan sebagainya.



Gender Tool Kit: Publik Sector Management

Asian Development Bank 978-92-9092-748-8

Buku ini dapat digunakan dalam pembuatan konsep dan perancangan program dan proyek yang responsif gender dalam manajemen sektor publik (MSP). Tujuannya adalah untuk membantu pengguna mengidentifikasi dan menelisik isu-isu gender dan membangun elemen desain praktis ke dalam program dan proyek PSM. Terdiri dari tiga bagian, tool kit ini memberikan panduan tentang isu-isu gender pada subsektor kunci MSP dan reformasi kebijakan sektor. Studi kasus dari program dan proyek ADB telah dimasukkan untuk menggambarkan praktek-praktek yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam masalah MSP.

Terima kasih kepada PNPM Mandiri, TII dan ADB atas sumbangan buku-bukunya untuk perpustakaan BaKTI.

Buku-buku tersebut diatas tersedia di Perpustakaan BaKTI. Perpustakaan BaKTI berada di Kantor BaKTI Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar Fasilitas ini terbuka untuk umum setiap hari kerja mulai dari jam 08:00 – 17:00.